

PEMERINTAH KOTA BINJAI



binjai



LAPORAN CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

2025

binjai

2026

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya milik Allah SWT, Shalawat dan Salam selalu turunkan kepada Rasulullah SAW karena berkat limpahan dan rahmatnya, Pemerintah Kota Binjai dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025.

Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan secara rinci upaya yang telah dilakukan dan capaian yang telah diraih yaitu dengan mengukur hasil pencapaian indikator-indikator sasaran misi pada dokumen RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Binjai yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025. Penyusunan Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025 sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2025, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Binjai yaitu:

“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”

sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Binjai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Binjai tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta

pengawasannya.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025 ini dapat menjadi cermin dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Binjai secara berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025 ini masih belum sempurna menyajikan yang lebih baik. Pada hakekatnya laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan guna perbaikan perencanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Binjai pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2025. Semoga Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Binjai.

Binjai, 31 Maret 2026



DAFTAR ISI

i

KATA PENGANTAR

iii

DAFTAR ISI

v

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

1

BAB I

PERENCANAAN KINERJA

- 2 a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai 2021 s.d 2026
- 10 b. Perjanjian Kinerja Walikota Binjai 2025

12

BAB II

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

- 13 A. Capaian Kinerja
 - 13 a. Capaian Perjanjian Kinerja 2025
 - 55 b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2024 dan 2023
 - 59 c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD
 - 63 d. Perbandingan Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

- 69 e. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
 - 72 f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
 - 76 g. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 76 Realisasi Anggaran



PEMERINTAH KOTA BINJAI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran Nomor 2, Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara 20714
Telepon (061) 8821860 Laman inspektorat.binjaikota.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN CAPAIAN
AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BINJAI TAHUN 2025**

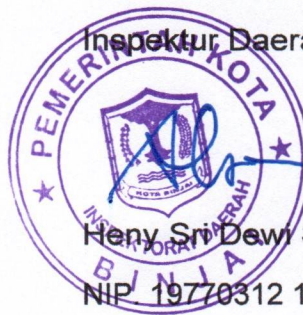
Kami telah mereviu Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Binjai, 30 Maret 2026

Inspektur Daerah



Heny Sri Dewi Sitepu, SE, M.SP

NIP. 19770312 199602 2 001

BAB I PERENCANAAN KINERJA



2025

BAB I

PERENCANAAN KINERJA

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai 2021 s.d 2026

Visi dan misi Pemerintah Kota Binjai telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

1. Visi

Visi Kota Binjai sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS

Visi tersebut mengandung maksud bahwa:

- a. MAJU** mengandung pengertian bahwa seiring berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya.
- b. BERBUDAYA** mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma kearifan lokal dalam kebudayaan yang berlaku di masyarakat sebagai filterisasi pengaruh negatif globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azas, taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga tercipta masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota maju dibanding daerah lainnya.
- c. RELIGIUS** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi " **MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS**" dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional.
- b. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.
- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah:

- a. Misi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional mempunyai pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dianggap penting karena untuk menjalankan misi selanjutnya memang dibutuhkan sistem kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang mumpuni, memiliki etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidangnya masing-masing.

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Pertama adalah:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi;
2. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima;
4. Penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (the right man on the right place).

- b. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertumpu pada pengembangan industri jasa, perdagangan, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Beberapa program prioritas untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah yang menyebar dan merata;
2. Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
4. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja;
5. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal;
6. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif;
7. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup.

- c. Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal,

produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah.

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Ketiga adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu;
4. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
5. Pembinaan olah raga, kepemudaan, pagayuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan;
6. Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran, dan Target Kinerja

Untuk mencapai ketiga misi pembangunan Kota Binjai dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan indikator tujuan, indikator sasaran, serta target yang hendak dicapai untuk selama 1 (satu) periode RPJMD yaitu 2021 s.d 2026.

Tabel tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja 2021-2026

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius												
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				
							2020	2022	2023	2024	2025	2026
1	Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional	Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi			Kategori	NA	CC	B	B	BB	BB
				Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Indeks Profesionalitas ASN	Poin	29,98	65	68	71	75	81
			Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3,22	3,32	3,34	3,36	3,38	3,40		

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target							
							2020	2022	2023	2024	2025	2026			
2	Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			nilai	NA	77 (B)	80 (B)	83 (B)	86 (B)	89 (A)			
							Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Persentase kondisi jalan baik	Persen	89,86	92	93	94	95	96
								Persentase akses air minum kota	Persen	28	35	40	50	55	60
								Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	47,1	54,0	59,0	61,0	64,0

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				
							2020	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11,12	11,4	11,6	11,8	11,9	12,0
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)				Persen	29,20	29,7	30,0	30,2	30,5	30,7	
	Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)				Persen	41,2	41,4	41,5	41,7	41,8	42,0	
	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,08	6,8	6,5	6,4	6,2	6,0	

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				
							2020	2022	2023	2024	2025	2026
3	Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas	Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			poin	75,89	76,80	77,35	77,90	78,50	79,10
				Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	poin	74,27	75,12	75,74	76,03	76,66	76,96
				Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indek Kesehatan	poin	80,58	81,35	81,62	82,02	82,28	82,68
				Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	poin	73,04	74,74	76,39	78,05	79,73	81,43

b. Perjanjian Kinerja Walikota Binjai 2025

Untuk memastikan ketercapaian rencana kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD 2021-2026, maka setiap Pemerintah Kota Binjai menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai sebuah perencanaan tahunan. Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah bentuk komitmen kinerja yang berisikan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, serta dilengkapi dengan besaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Berikut tabel Perjanjian Kinerja Kota Binjai Tahun 2025.

Tabel 1.2 Perjanjian Kinerja Walikota Binjai Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB
		Opini BPK	Opini	WTP
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	75,00
		Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3,38
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	86
		Persentase kondisi jalan baik	Persen	95,00
		Persentase akses air minum kota	Persen	100
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,00

4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11,90
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	30,50
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41,80
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,44
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	76,72
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	83,77
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	79,73

BABII CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA



2025

BAB II

CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

a. Capaian Perjanjian Kinerja 2025

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setelah diawal tahun ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, dan sepanjang tahun dilaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di RPJMD 2021- 2026, dan Perjanjian Kinerja 2025, maka pada akhir tahun 2025 dan/atau awal tahun 2026 dilakukan pengukuran realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran realisasi indikator kinerja ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Binjai dapat mencapai target- target yang telah diperjanjikan.

Pengukuran kinerja tidak hanya dilakukan oleh internal Pemerintah Kota Binjai sendiri, namun juga dilakukan oleh pihak-pihak lainnya, misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional Medan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Hasil pengukuran realisasi indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Walikota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Pengukuran Target dan Realisasi Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB	66,67*	95%	Kementerian PANRB
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	BPK Perwakilan Sumatera Utara
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	75,00	78,73	105%	Kantor Regional VI BKN Medan
		Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3,38	2,7697*	82%	Kementerian Dalam Negeri
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	86	83,8	97%	Bapperida Kota Binjai
		Persentase kondisi jalan baik	Persen	95,00	71	75%	BPS Kota Binjai
		Persentase akses air minum kota	Persen	100	98,50	98,50%	BPS Kota Binjai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,00	66,36	104%	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11,90	11,47	96%	BPS Kota Binjai
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	30,50	30,72	101%	BPS Kota Binjai
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41,80	33,48	80%	BPS Kota Binjai
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,44	5,37	101%	BPS Kota Binjai
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	76,72	76,78	100%	BPS Kota Binjai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	83,77	84,32	101%	BPS Kota Binjai
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	79,73	76,73	96%	BPS Kota Binjai
Rata-rata Capaian Kinerja						95%	

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya

1. Analisis Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan.

Indikator 1

Indeks Reformasi Birokrasi

Target Nilai Indikator kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi adalah Kategori B dan terealisasi dengan kategori B nilai 66,71*.

Tabel 2.2

Nilai Indeks RB Pemerintah Kota Binjai

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	60
B	RB Tematik	20	6,71
C	Indeks RB	120	66,71
			B

Sumber Data: KemenpanRB Tahun 2024

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional.

Pemerintah Kota Binjai telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan, diantaranya:

- ✚ Meningkatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pada Tahun 2024, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah 60,19 dengan predikat B. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/238/AA.05/2025 Tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 adalah 62,24 dengan predikat B, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 2.3
Rincian Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2024	2025
a	Perencanaan Kinerja	30	20,05	20,53
b	Pengukuran Kinerja	30	12,40	12,40
c	Pelaporan Kinerja	15	10,92	10,92
d	Evaluasi Kinerja	25	16,82	18,39
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,19	62,24
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

✚ Meningkatkan Indeks Reformasi Hukum

Pada Tahun 2025, Indeks Reformasi Hukum Kota Binjai adalah 2024 adalah 98.22 dengan kategori AA (ISTIMEWA). Mendapatkan reward terbaik III se Provinsi Sumatera Utara. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	23.5
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	18	16.5
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	6	5.4

	yang berasal dari Pemerintah Daerah		
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	6
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	5.1
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan	7	7
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	25
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	7	7
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	6
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	12
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	30	22.6
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	8	6
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	8.5
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	6	5.1
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analisis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	3
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	20
1	Pengelolaan JDIIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	20
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	91.1

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni:

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	
1	<p>Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan:</p> <p>a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah</p>	
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Data dukung yang di upload tidak melampirkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah yang sudah diparaf oleh seluruh Panitia Antarperangkat Daerah
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> •
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Data dukung yang di upload tidak melampirkan dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan sekretaris daerah dan pemrakarsa pada halaman depan, halaman belakang dan lembar acak;

2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan	
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	<ul style="list-style-type: none"> • SK tidak jelas berapa kali kegiatan
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Perda yang ditargetkan dengan data yang berhasil dievaluasi tidak sinkron
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Propemperda tidak bisa sebagai hasil ANev
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dari rekap data fungsional analis hukum yang masuk SK Anev tidak jelas
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai = 89 berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-report) Tahun 2024 Rekomendasi: <ul style="list-style-type: none"> • Konsisten dalam Pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019

	dan Informasi Hukum	tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Data dukung yang disampaikan pada Variabel 4 bersifat sebagai kelengkapan administrasi dalam pengisian LKP IRH. Adapun nilai pada Variabel 4 secara langsung mengacu pada hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-Report) Tahun 2024.
--	---------------------	--

Pada tahun Penilaian 2025 Kementerian Hukum *Leading Institutional* IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:

**FORMULA NILAI APRESIASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA**


Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = X_0 + (X_{max} - X_0) \cdot 80\%$$

Dimana :
F(x) = Nilai akhir IRH
X₀ = Nilai awal instansi
X_{max} = Nilai maximum tujuan
 Koefisien pengali = 0,8 (80%)

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

	Penilaian	Nilai
	Nilai Awal	91.10
	Nilai Apresiasi	7.12
	Nilai Akhir	98.22

 **Meningkatnya Tingkat Digitalisasi Arsip**

Pada Tahun 2024 nilai tingkat digitalisasi arsip Kota Binjai adalah 16,82, sedangkan pada tahun 2025 nilai tingkat digitalisasi arsip Kota Binjai berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: T/AK.01.00/142 dan surat Kepala Dinas Perpustakaan dan

Arsip Provinsi Sumatera Utara Nomor:
000.5.15.2/6/DISPUSIP/I/2026 adalah 60,86 dengan kategori B (baik). Terdapat peningkatan dalam pengawasan digitalisasi arsip Kota Binjai meskipun masih diperlukan beberapa perbaikan.

Meningkatkan Indeks Kualitas Kebijakan

Pada tahun 2024, nilai indeks kualitas kebijakan Pemerintah Kota Binjai adalah 0, dikarenakan belum ikut berpartisipasi dalam pengukuran nasional IKK yang diselenggarakan oleh LAN, sedangkan pada tahun 2025, nilai indeks kualitas kebijakan Pemerintah Kota Binjai berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 737/K.1/HKM.02.2/2025 adalah 58,73 dengan kualifikasi cukup.

Indikator 2

Opini BPK

Berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 214b/S/XVIII.MDN/05/2025 Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran (TA) 2024, Opini atas Laporan Keuangan Kota Binjai adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai TA. 2024 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai dengan memberikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi Pemerintahan,

kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK menemukan masih adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara yang harus diperbaiki Pemerintah Kota Binjai.

Indikator 3

Indeks Profesional ASN

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dengan target 75 pada tahun 2025 mencapai realisasi 78,73 atau sebesar 105% dengan kategori **Sedang**.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ASN telah berjalan efektif, khususnya dalam peningkatan kompetensi, kinerja, dan penerapan sistem manajemen kepegawaian berbasis merit. Kedepan, peningkatan profesionalitas ASN akan terus dioptimalkan melalui pengembangan kompetensi yang lebih merata, penguatan manajemen kinerja, serta pemutakhiran data ASN secara berkelanjutan.

Untuk capaian IP ASN Tahun 2025 Kota Binjai target yang ditentukan telah tercapai dengan nilai sebesar 78,73 yang terdiri dari Indeks Kualifikasi sebesar 21,09, Indeks Kompetensi sebesar 27,9, Indeks Kinerja sebesar 24,74, dan Indeks Disiplin sebesar 5,00 dengan jumlah PNS yang diukur sebanyak 3.556 Orang .

Faktor Pendukung:

1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan manajerial.
2. Penerapan sistem manajemen kinerja ASN yang semakin terstruktur dan terukur.
3. Peningkatan kepatuhan terhadap pengisian dan pemutakhiran data ASN pada sistem informasi kepegawaian.
4. Komitmen pimpinan dalam mendorong penerapan sistem merit dan peningkatan kinerja aparatur.
5. Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Faktor Penghambat:

1. Belum meratanya kesempatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN.
2. Masih terdapat ASN yang belum optimal dalam pemenuhan standar kompetensi jabatan.
3. Keterbatasan anggaran dan waktu dalam pelaksanaan pengembangan SDM aparatur.

Tindak Lanjut / Upaya Peningkatan Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN pada periode selanjutnya, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan program pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan.
2. Memperkuat implementasi manajemen kinerja berbasis individu dan organisasi.
3. Mengoptimalkan pemutakhiran data ASN secara berkala dan berkelanjutan.
4. Mendorong peningkatan disiplin, kinerja, dan profesionalisme ASN melalui pembinaan dan pengawasan yang konsisten.

Indikator 4

Nilai Evaluasi LPPD

Target Nilai Indikator kinerja Nilai Evaluasi LPPD adalah nilai 3,38 dan terealisasi dengan nilai 2,7697 status sedang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, hasil Nilai LPPD Kota Binjai adalah 2,7697 dengan status sedang. Hal ini menunjukkan masih perlu banyak perbaikan yang harus dilakukan untuk mendorong pencapaian penyelenggaraan pemerintah Kota Binjai menjadi lebih baik ke depannya.

Beberapa faktor yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai LPPD diantaranya:

- Realisasi target kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Kota Binjai dan kelengkapan data pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Perangkat Daerah terkait.
- Dilakukan Sosialisasi Penyusunan LPPD oleh Pemerintah Kota Binjai melalui Bagian Pemerintahan, yang diikuti oleh Perangkat Daerah terkait yaitu Perangkat Daerah yang mempunyai Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan fungsi penunjang urusan Pemerintah ditambah Perangkat Daerah Pendukung (Bappeda, Bapenda, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum), serta narasumber dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.
- Dilakukan pembentukan TIM penyusunan LPPD untuk mempermudah koordinasi.

2. Analisis Sasaran Strategis 2: Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik.

Indikator 5

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks kepuasan layanan infrastruktur merupakan nilai kepuasan masyarakat atas layanan infrastruktur pada suatu kota/kabupaten. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil diskusi dengan pihak penyedia pekerjaan yakni Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kota Binjai, terdapat beberapa indikator dan sub indikator yang dijadikan landasan dalam penilaian dalam kepuasan layanan infrastruktur Kota Binjai. Indikator dan sub indikator tersebut telah disusun dalam suatu kuesioner survei yang ditujukan ke masyarakat guna melihat sejauh mana kualitas layanan.

Adapun kebutuhan data dasar yakni berupa rekapitulasi dan dokumentasi data survei kepuasan masyarakat atas layanan sarana dan prasarana (infrastruktur) Kota Binjai serta data dan informasi terkait perencanaan dan realisasi pembangunan infrastruktur Kota Binjai.

Tabel 2.4
Nilai Rata – Rata Persepsi Jawaban Masyarakat Atas Layanan
Infrastruktur Berdasarkan Infrastruktur

NO	INFRASTRUKTUR/SUB INDIKATOR	INDIKATOR	RATA- RATA JAWABAN	RATA-RATA JAWABAN INFRASTRUKTUR
1	JALAN KOTA	Ketersediaan	4.2	4.2
		Kualitas Fisik	4.1	
		Kesesuaian	4.1	
		Pemanfaatan	4.2	
		Kontribusi Perekonomian	4.2	
2	JALAN LINGKUNGAN	Ketersediaan	4.0	4.0
		Kualitas Fisik	4.0	
		Kesesuaian	4.0	
		Pemanfaatan	4.0	
		Kontribusi Perekonomian	4.0	
3	JEMBATAN	Ketersediaan	4.2	4.1
		Kualitas Fisik	4.1	
		Kesesuaian	4.2	
		Pemanfaatan	4.2	
		Kontribusi Perekonomian	4.1	
4	SUMBER AIR	Ketersediaan	4.2	4.2
		Kualitas Fisik	4.1	
		Kesesuaian	4.2	
		Pemanfaatan	4.2	
		Kontribusi Perekonomian	4.2	
5	DRAINASE	Ketersediaan	3.9	3.9
		Kualitas Fisik	3.8	
		Kesesuaian	3.8	
		Pemanfaatan	3.8	
		Kontribusi Perekonomian	3.9	
6	JARINGAN LISTRIK	Ketersediaan	4.3	4.3

		Kualitas Fisik	4.2	
		Kesesuaian	4.3	
		Pemanfaatan	4.3	
		Kontribusi Perekonomian	4.2	
7	JARINGAN INTERNET	Ketersediaan	4.3	4.3
		Kualitas Fisik	4.3	
		Kesesuaian	4.3	
		Pemanfaatan	4.3	
		Kontribusi Perekonomian	4.3	
8	JARINGAN TELEPON	Ketersediaan	4.3	4.3
		Kualitas Fisik	4.3	
		Kesesuaian	4.3	
		Pemanfaatan	4.3	
		Kontribusi Perekonomian	4.3	
9	PERSAMPAHAN	Ketersediaan	4.1	4.0
		Kualitas Fisik	4.0	
		Kesesuaian	4.1	
		Pemanfaatan	4.1	
		Kontribusi Perekonomian	4.1	
10	PEDESTRIAN	Ketersediaan	4.1	4.1
		Kualitas Fisik	4.1	
		Kesesuaian	4.1	
		Pemanfaatan	4.1	
		Kontribusi Perekonomian	4.1	
11	TAMAN KOTA	Ketersediaan	4.3	4.2
		Kualitas Fisik	4.1	
		Kesesuaian	4.2	
		Pemanfaatan	4.3	
		Kontribusi Perekonomian	4.3	
12	SARANA OLAHRAGA	Ketersediaan	4.1	4.1

		Kualitas Fisik	4.1	
		Kesesuaian	4.1	
		Pemanfaatan	4.1	
		Kontribusi Perekonomian	4.1	
13	KERETA API	Ketersediaan	4.4	4.4
		Kualitas Fisik	4.4	
		Kesesuaian	4.4	
		Pemanfaatan	4.4	
		Kontribusi Perekonomian	4.4	
14	STASIUN KERETA API	Ketersediaan	4.4	4.4
		Kualitas Fisik	4.4	
		Kesesuaian	4.4	
		Pemanfaatan	4.4	
		Kontribusi Perekonomian	4.4	
15	ANGKUTAN UMUM DALAM KOTA	Ketersediaan	4.2	4.2
		Kualitas Fisik	4.1	
		Kesesuaian	4.2	
		Pemanfaatan	4.2	
		Kontribusi Perekonomian	4.2	
16	TERMINAL	Ketersediaan	4.2	4.1
		Kualitas Fisik	4.1	
		Kesesuaian	4.1	
		Pemanfaatan	4.1	
		Kontribusi Perekonomian	4.1	
17	PENDIDIKAN	Ketersediaan	4.3	4.3
		Kualitas Fisik	4.3	
		Kesesuaian	4.3	
		Pemanfaatan	4.3	
		Kontribusi Perekonomian	4.3	
18	KESEHATAN	Ketersediaan	4.2	4.2

		Kualitas Fisik	4.2	
		Kesesuaian	4.2	
		Pemanfaatan	4.2	
		Kontribusi Perekonomian	4.2	
19	PASAR	Ketersediaan	4.1	4.1
		Kualitas Fisik	4.1	
		Kesesuaian	4.1	
		Pemanfaatan	4.1	
		Kontribusi Perekonomian	4.1	
20	TEMPAT IBADAH	Ketersediaan	4.5	4.5
		Kualitas Fisik	4.5	
		Kesesuaian	4.5	
		Pemanfaatan	4.5	
		Kontribusi Perekonomian	4.5	

NO	INDIKATOR	INDIKATOR	FREKUENSI JAWABAN					TOTAL RESPONDEN	Nilai Jawaban					Rata-Rata Jawaban	Rata-Rata Jawaban Infrastruktur	Rata-Rata Indikator	Capaian Indikator		
			1 (Sangat Baik)	2 (Baik)	3 (Cukup Baik)	4 (Sangat Buruk)	5 (Buruk)		1,0	2,0	3,0	4,0	5,0						
1	Jalan Kota	Ketersediaan	0	11	11	281	97	400	0,0	27,0	33,0	1124,0	485,0	1644,0	4,2	4.2	4.19	83.8	
		Kualitas Fisik	0	11	17	288	84	400	0,0	27,0	51,0	1152,0	420,0	1445,0	4,1				
		Kesesuaian	0	8	18	282	92	400	0,0	16,0	54,0	1128,0	460,0	1428,0	4,1				
		Pemanfaatan	0	7	16	285	92	400	0,0	14,0	48,0	1140,0	440,0	1420,0	4,2				
		Kontribusi Perekonomian	0	4	11	288	95	400	0,0	12,0	33,0	1124,0	475,0	1473,0	4,2				
2	Jalan Lingkungan	Ketersediaan	0	10	40	284	66	400	0,0	24,0	120,0	1136,0	290,0	1303,0	4,0	4.0			
		Kualitas Fisik	0	10	40	284	66	400	0,0	24,0	120,0	1136,0	290,0	1303,0	4,0				
		Kesesuaian	0	17	41	287	55	400	0,0	34,0	112,0	1148,0	270,0	1309,0	4,0				
		Pemanfaatan	0	17	34	293	56	400	0,0	34,0	102,0	1172,0	280,0	1388,0	4,0				
		Kontribusi Perekonomian	0	17	24	296	53	400	0,0	34,0	102,0	1184,0	240,0	1385,0	4,0				
3	Jembatan	Ketersediaan	0	1	4	326	69	400	0,0	2,0	12,0	1304,0	345,0	1443,0	4,2	4.1			
		Kualitas Fisik	0	1	5	343	51	400	0,0	2,0	15,0	1372,0	351,0	1444,0	4,1				
		Kesesuaian	0	0	3	329	67	400	0,0	0,0	9,0	1320,0	371,0	1444,0	4,2				
		Pemanfaatan	0	0	3	322	75	400	0,0	0,0	9,0	1328,0	321,0	1443,0	4,2				
		Kontribusi Perekonomian	0	0	4	324	72	400	0,0	0,0	12,0	1336,0	310,0	1428,0	4,1				
4	Sumbu Air	Ketersediaan	0	11	22	252	114	400	0,0	27,0	69,0	1088,0	270,0	1468,0	4,2	4.2			
		Kualitas Fisik	0	11	29	261	99	400	0,0	27,0	87,0	1044,0	495,0	1468,0	4,1				
		Kesesuaian	0	9	28	250	113	400	0,0	18,0	84,0	1068,0	540,0	1467,0	4,2				
		Pemanfaatan	0	7	25	255	115	400	0,0	14,0	75,0	1030,0	540,0	1474,0	4,2				
		Kontribusi Perekonomian	0	7	25	254	114	400	0,0	14,0	75,0	1014,0	570,0	1475,0	4,2				
5	Lingkungan	Ketersediaan	2	19	29	295	45	400	2,0	36,0	117,0	1180,0	321,0	1543,0	3,9	3.9			
		Kualitas Fisik	1	22	20	303	54	400	1,0	44,0	150,0	1200,0	321,0	1530,0	3,8				
		Kesesuaian	2	18	49	303	38	400	2,0	36,0	147,0	1212,0	340,0	1517,0	3,8				
		Pemanfaatan	2	20	43	309	26	400	2,0	40,0	124,0	1234,0	321,0	1519,0	3,8				
		Kontribusi Perekonomian	2	18	36	312	32	400	2,0	36,0	108,0	1248,0	340,0	1514,0	3,9				
6	Jaringan Listrik	Ketersediaan	0	0	2	284	114	400	0,0	0,0	6,0	1136,0	570,0	1712,0	4,3	4.3			
		Kualitas Fisik	0	0	2	299	99	400	0,0	0,0	6,0	1194,0	495,0	1697,0	4,2				
		Kesesuaian	0	0	1	285	114	400	0,0	0,0	2,0	1140,0	570,0	1712,0	4,3				
		Pemanfaatan	0	0	1	285	114	400	0,0	0,0	2,0	1140,0	570,0	1712,0	4,3				
		Kontribusi Perekonomian	0	0	1	285	114	400	0,0	0,0	2,0	1140,0	570,0	1712,0	4,3				
7	Jaringan Internet	Ketersediaan	0	6	11	288	95	400	0,0	12,0	33,0	1152,0	475,0	1473,0	4,2	4.3			
		Kualitas Fisik	0	2	2	285	108	400	0,0	4,0	6,0	1072,0	440,0	1720,0	4,2				
		Kesesuaian	0	1	3	287	107	400	0,0	2,0	9,0	1076,0	431,0	1723,0	4,2				
		Pemanfaatan	0	3	3	288	108	400	0,0	4,0	6,0	1072,0	440,0	1720,0	4,2				
		Kontribusi Perekonomian	0	1	3	287	109	400	0,0	2,0	9,0	1068,0	445,0	1724,0	4,2				
8	Jaringan Telepon	Ketersediaan	0	2	2	267	129	400	0,0	4,0	6,0	1048,0	445,0	1723,0	4,2	4.3			
		Kualitas Fisik	0	0	2	272	126	400	0,0	0,0	6,0	1088,0	420,0	1714,0	4,2				
		Kesesuaian	0	1	2	272	125	400	0,0	2,0	4,0	1088,0	425,0	1711,0	4,2				
		Pemanfaatan	0	0	2	270	127	400	0,0	0,0	9,0	1080,0	425,0	1714,0	4,2				
		Kontribusi Perekonomian	0	0	3	270	127	400	0,0	0,0	9,0	1080,0	425,0	1714,0	4,2				
9	Pencapaian	Ketersediaan	0	0	0	29	322	59	400	0,0	0,0	94,0	1389,0	350,0	1423,0	4,1	4.0		
		Kualitas Fisik	0	0	0	31	323	46	400	0,0	0,0	93,0	1314,0	380,0	1409,0	4,0			
		Kesesuaian	0	0	0	29	313	51	400	0,0	0,0	96,0	1276,0	351,0	1421,0	4,1			
		Pemanfaatan	0	0	0	29	323	51	400	0,0	0,0	87,0	1380,0	351,0	1423,0	4,1			
		Kontribusi Perekonomian	0	0	0	29	321	50	400	0,0	0,0	87,0	1384,0	350,0	1421,0	4,1			
10	Pedestrian	Ketersediaan	0	0	17	327	56	400	0,0	0,0	51,0	1308,0	280,0	1429,0	4,1	4.1			
		Kualitas Fisik	0	2	18	325	55	400	0,0	4,0	54,0	1300,0	275,0	1423,0	4,1				
		Kesesuaian	0	1	16	320	63	400	0,0	2,0	48,0	1320,0	245,0	1425,0	4,1				
		Pemanfaatan	0	1	16	320	63	400	0,0	2,0	48,0	1320,0	245,0	1425,0	4,1				
		Kontribusi Perekonomian	0	0	17	327	56	400	0,0	0,0	51,0	1308,0	280,0	1429,0	4,1				

NO	INFRASTRUKTUR SUB INDIKATOR	INDIKATOR	FREKUENSI JAWABAN					TOTAL RESPONDEN	Nilai jawaban					Rata-Rata jawaban	Rata-Rata jawaban Infrastruktur	Rata-Rata Infrastruktur	Capaian Infrastruktur		
			Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik		1,0	2,0	3,0	4,0	5,0						
11	Jalan Kota	Keterbacaan	0	0	13	323	54	400	0,0	0,0	29,0	122,0	270,0	141,0	4,1	4,2			
		Kualitas Fisik	0	0	4	380	114	400	0,0	0,0	18,0	120,0	170,0	170,0	4,3				
		Kemudahan	0	2	18	322	55	400	0,0	0,0	4,0	54,0	130,0	270,0	143,0				4,1
		Pemerataan	0	0	4	279	115	400	0,0	0,0	18,0	114,0	170,0	170,0	4,3				
		Pemerataan	0	0	4	279	115	400	0,0	0,0	18,0	114,0	170,0	170,0	4,3				
12	Sarana Olah Raga	Keterbacaan	0	0	4	380	114	400	0,0	0,0	18,0	120,0	170,0	170,0	4,3	4,1			
		Kualitas Fisik	1	2	20	361	79	400	1,0	4,0	60,0	129,0	240,0	162,0	4,1				
		Kemudahan	3	4	20	361	75	400	2,0	6,0	60,0	124,0	240,0	164,0	4,1				
		Pemerataan	0	1	18	367	74	400	0,0	2,0	54,0	128,0	270,0	164,0	4,1				
		Pemerataan	0	1	18	367	74	400	0,0	2,0	54,0	128,0	270,0	164,0	4,1				
13	Kereta Api	Keterbacaan	0	0	1	323	115	400	0,0	0,0	18,0	120,0	270,0	170,0	4,4	4,4			
		Kualitas Fisik	0	0	1	323	181	400	0,0	0,0	3,0	92,0	805,0	1760,0	4,4				
		Kemudahan	0	0	1	323	184	400	0,0	0,0	3,0	92,0	820,0	1765,0	4,4				
		Pemerataan	0	0	1	324	185	400	0,0	0,0	3,0	93,0	825,0	1764,0	4,4				
		Pemerataan	0	0	1	324	185	400	0,0	0,0	3,0	93,0	825,0	1764,0	4,4				
14	Stasiun Kereta Api	Keterbacaan	0	0	3	229	158	400	0,0	0,0	9,0	94,0	790,0	1755,0	4,4	4,4			
		Kualitas Fisik	0	0	3	229	158	400	0,0	0,0	9,0	94,0	790,0	1755,0	4,4				
		Kemudahan	0	0	3	229	158	400	0,0	0,0	9,0	94,0	790,0	1755,0	4,4				
		Pemerataan	0	0	3	227	160	400	0,0	0,0	9,0	94,0	800,0	1757,0	4,4				
		Pemerataan	0	0	3	227	160	400	0,0	0,0	9,0	94,0	800,0	1757,0	4,4				
15	Angkot	Keterbacaan	0	0	4	323	157	400	0,0	0,0	12,0	95,0	790,0	1753,0	4,4	4,2			
		Kualitas Fisik	0	0	18	276	76	400	0,0	0,0	54,0	112,0	480,0	1662,0	4,2				
		Kemudahan	0	0	18	287	95	400	0,0	0,0	54,0	128,0	480,0	1680,0	4,1				
		Pemerataan	0	0	18	277	97	400	0,0	0,0	54,0	128,0	480,0	1662,0	4,2				
		Pemerataan	0	0	18	276	96	400	0,0	0,0	54,0	112,0	480,0	1662,0	4,2				
16	Terminal	Keterbacaan	0	0	17	380	95	400	0,0	0,0	11,0	120,0	475,0	1662,0	4,2	4,1			
		Kualitas Fisik	0	5	11	362	82	400	0,0	0,0	33,0	128,0	410,0	1610,0	4,2				
		Kemudahan	0	5	13	362	80	400	0,0	0,0	36,0	121,0	430,0	1608,0	4,1				
		Pemerataan	0	5	11	364	80	400	0,0	0,0	33,0	124,0	430,0	1603,0	4,1				
		Pemerataan	0	5	13	365	79	400	0,0	0,0	36,0	120,0	390,0	1603,0	4,1				
17	Pondokan	Keterbacaan	0	0	4	291	105	400	0,0	0,0	12,0	144,0	525,0	1761,0	4,3	4,3			
		Kualitas Fisik	0	0	4	291	105	400	0,0	0,0	12,0	144,0	525,0	1761,0	4,3				
		Kemudahan	0	0	4	289	107	400	0,0	0,0	12,0	154,0	525,0	1763,0	4,3				
		Pemerataan	0	0	4	289	107	400	0,0	0,0	12,0	154,0	525,0	1763,0	4,3				
		Pemerataan	0	0	4	289	107	400	0,0	0,0	12,0	154,0	525,0	1763,0	4,3				
18	Kesehatan	Keterbacaan	0	0	2	310	88	400	0,0	0,0	6,0	124,0	440,0	1686,0	4,2	4,2			
		Kualitas Fisik	0	0	2	310	88	400	0,0	0,0	6,0	124,0	440,0	1686,0	4,2				
		Kemudahan	0	0	2	310	88	400	0,0	0,0	6,0	124,0	440,0	1686,0	4,2				
		Pemerataan	0	0	2	309	89	400	0,0	0,0	6,0	124,0	440,0	1687,0	4,2				
		Pemerataan	0	0	2	310	88	400	0,0	0,0	6,0	124,0	440,0	1686,0	4,2				
19	Pasar	Keterbacaan	0	3	17	310	71	400	0,0	4,0	11,0	124,0	351,0	1683,0	4,1	4,1			
		Kualitas Fisik	0	3	23	367	69	400	0,0	4,0	66,0	128,0	345,0	1643,0	4,1				
		Kemudahan	0	1	17	312	70	400	0,0	2,0	11,0	124,0	352,0	1651,0	4,1				
		Pemerataan	0	3	16	311	71	400	0,0	4,0	66,0	124,0	351,0	1651,0	4,1				
		Pemerataan	0	1	16	311	72	400	0,0	2,0	66,0	124,0	340,0	1654,0	4,1				
20	Tempat Badah	Keterbacaan	0	0	2	292	106	400	0,0	0,0	6,0	80,0	940,0	1794,0	4,5	4,5			
		Kualitas Fisik	0	0	2	191	207	400	0,0	0,0	6,0	74,0	1055,0	1805,0	4,5				
		Kemudahan	0	0	2	292	105	400	0,0	0,0	6,0	81,0	975,0	1793,0	4,5				
		Pemerataan	0	0	2	294	102	400	0,0	0,0	6,0	81,0	940,0	1790,0	4,5				
		Pemerataan	1	0	2	292	102	400	1,0	0,0	6,0	82,0	940,0	1787,0	4,5				

perolehan nilai IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur) Kota Binjai saat ini sebesar 83,8 indeks. Artinya Kota Binjai memiliki mutu pelayanan infrastruktur dengan predikat B dan kinerja pelayanannya “Baik”.

Pemerintah Kota Binjai berkomitmen untuk terus memperbaiki layanan infrastruktur Kota Binjai, Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan berdasarkan saran dan persepsi yang telah di berikan masyarakat.

Indikator 6

Persentase Kondisi Jalan Baik

Target persentase kondisi jalan baik Kota Binjai adalah 95% dan terealisasi 75%.

Sampai tahun 2024 panjang jalan di Binjai mencapai 362.83 km, dengan rincian panjang jalan di Kecamatan Binjai Selatan 103.869 km, Kecamatan Binjai Kota 32.113 km, Kecamatan Binjai Timur, 83.516 km, Kecamatan Binjai Utara 84.832 km, dan Kecamatan Binjai Barat 58.501

km.

Kondisi jalan di Kota Binjai yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dikarenakan kondisi rusak dan rusak berat sepanjang 87,83km atau 24 persen dari total jalan di Kota Binjai.

Tabel 2.5
Panjang Jalan Menurut Status Jalan di Kota Binjai, 2025

Uraian	Jalan Negara State Road (km)	Jalan Provinsi Provincial Road (km)	Jalan Kota City Road (km)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Jenis Permukaan/ Type of Surface			
a. Diaspal/ Asphaltized	-	-	356,43
b. Kerikil/ Gravel	-	-	3,85
c. Tanah/ Land	-	-	1,37
d. Tidak dirinci	-	-	1,18
Jumlah			362,83
2 Kondisi jalan/ Road Status			
a. Baik/ Good	-	-	253,05
b. Sedang/ Fair	-	-	21,98
c. Rusak/ Bad	-	-	78,48
d. Rusak Berat/ Very Bad	-	-	9,35
Jumlah			362,86
3 Kelas jalan			
Kelas I	-	-	-
kelas II	-	-	-
Kelas III	-	-	-
Kelas tidak dirinci	-	-	-

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai

Indikator 7

Persentase Akses Air Minum Kota

Target persentase akses air minum kota adalah 100% dan terealisasi 98,50%.

Tabel 2.6
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2021-2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2021	2022	2023	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
01 Nias	47,79	51,59	51,33	48,88	51,90
02 Mandailing Natal	73,78	75,48	78,93	84,72	81,43
03 Tapanuli Selatan	67,39	73,17	75,78	74,84	75,01
04 Tapanuli Tengah	68,81	79,28	78,31	82,98	86,20
05 Tapanuli Utara	89,06	92,89	90,83	92,91	90,23
06 Toba	95,04	96,05	96,04	96,01	96,36
07 Labuhanbatu	94,34	93,68	91,88	93,42	92,62
08 Asahan	95,78	92,92	93,94	94,60	95,93
09 Simalungun	99,74	98,66	98,48	99,09	99,65
10 Dairi	91,90	96,68	92,31	97,62	97,06
11 Karo	91,43	91,54	93,13	96,61	97,57
12 Deli Serdang	98,18	97,38	95,51	96,37	96,47
13 Langkat	92,51	92,66	96,29	92,49	94,39
14 Nias Selatan	66,21	66,71	64,55	69,38	73,25
15 Humbang Hasundutan	91,95	90,51	94,94	97,73	97,11
16 Pakpak Bharat	70,69	81,87	73,47	68,97	66,54
17 Samosir	65,64	74,70	74,78	80,38	83,08
18 Serdang Bedagai	98,14	99,32	97,53	98,43	99,30
19 Batu Bara	97,83	96,96	97,21	97,11	98,12
20 Padang Lawas Utara	77,58	82,13	83,78	82,23	84,86
21 Padang Lawas	77,84	83,67	85,99	89,96	87,62
22 Labuhanbatu Selatan	84,66	91,30	90,47	90,05	89,97
23 Labuhanbatu Utara	86,75	93,04	95,48	91,50	93,68
24 Nias Utara	58,17	69,77	66,28	71,72	74,34
25 Nias Barat	71,52	70,74	71,05	70,95	75,03
Kota/Municipality					
71 Sibolga	92,40	97,69	88,85	96,86	98,96
72 Tanjungbalai	87,20	87,59	100,00	91,27	84,89
73 Pematangsiantar	99,78	99,84	99,96	99,74	99,61
74 Tebing Tinggi	99,35	99,71	99,13	99,53	99,20
75 Medan	98,80	98,53	98,05	99,84	99,26
76 Binjai	99,76	98,79	64,47	98,88	98,50
77 Padangsidimpuan	54,13	63,50	80,11	64,99	64,23
78 Gunungsitoli	74,11	77,18	51,33	80,17	82,35
Sumatera Utara	90,89	92,13	92,19	92,94	93,24

Sumber Data: BPS Prosu, Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2026

Tabel 2.7
Distribusi persentase rumah tangga menurut sumber air utama untuk mandi, cuci, dll Kota Binjai Tahun 2025

Sumber Air Minum/ Source Drinking Water	2025
(1)	(2)
Air Kemasan Bermerek/Isi Ulang/ Branded Bottled Water/Refill Water	NA
Leding/Plumber Water	7,98
Sumur Bor/Pompa/ Pumped Water	50,58
Sumur/ Mata Air Terlindung/ Protected Well/Protect Spring	39,02
Sumur /Mata Air Tak Terlindung/ Unprotected Well/Unprotect Spring	1,92
Air Permukaan/ Surface Water	-
Air Hujan/ Rain Water Collection	-
Jumlah/Total	100,00

Sumber Data: BPS Kota Binjai, Kota Binjai dalam Angka 2026

Sebagian besar rumah tangga di Kota Binjai menggunakan sumber utama untuk mandi/cuci/dll dari air kemasan/isi ulang yaitu mencapai NA persen, leding 7,98 persen, sumur bor/pompa 50,58 persen sumur/ mata air terlindung/air hujan 1,92 persen.

3. Analisis Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Indikator 8

Indeks Lingkungan Hidup

Target Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pemerintah Kota Binjai adalah 64,00 poin, IKLH Kota Binjai terealisasi pada nilai 66,36 poin.

Tabel 2.8
Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Binjai

	Komponen Indeks Yang Dihitung	Nilai		Kategori
		2024	2025	
a	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,33	66,70	sedang
b	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,51	76,56	baik
c	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	22,4	46,90	kurang
	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,81	66,36	sedang

Pelaksanaan perhitungan kualitas air dilakukan dengan melakukan pengujian sampel baku mutu air sungai yang ada di Kota Binjai yakni di 3 sungai (Sungai Bingei, Sungai Bangkatan dan Sungai Mencirim). Pemantauan dilakukan sebanyak 2 kali yaitu di bulan Juni dan di bulan September tahun 2025. Ada sebanyak 20 parameter yang di ukur dari sampel yang di ambil, yang kemudian diinput di aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian menghasilkan nilai Indeks Kualitas Air sebesar 66,70 poin.

Pelaksanaan pemantauan kualitas udara dilakukan dengan menggunakan metode/alat Passive Sampler. Passive sampler merupakan peralatan untuk sampling yang digunakan untuk mengambil sampel dari udara ambien untuk parameter Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂) yang diletakkan di beberapa titik di Kota Binjai, yaitu di daerah pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi. Dari hasil pengukuran maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 76,56 poin.

Pelaksanaan perhitungan kualitas lahan dilakukan dengan menggunakan citra satelit yaitu luas tutupan hutan dan luas tutupan vegetasi non hutan. Dari hasil perhitungan diperoleh Indeks Kualitas Lahan sebesar 46,90 poin yang mana ada kenaikan dibanding tahun 2024 (22,40 poin).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan.

$$\begin{aligned} \text{IKLH Kabupaten/ Kota} &====> \text{IKLH} = \\ &(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) = \\ &(0,376 \times 66,70) + (0,405 \times 76,56) + (0,219 \times 46,90) = 66,36 \text{ poin} \end{aligned}$$

Adapun nilai IKLH yang diperoleh diatas termasuk dalam rating kategori Sedang.

Hasil Pemantauan/Pengujian Kualitas Air

NO	Kode Lokasi	Alamat	Sungai	Das	Tanggal	Kategori	Kab/Kota	Provinsi	Titik Koordinat		STATUS MUTU			
									Latitude	Longitude	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	KELAS 4
Pemantauan 1														
1	A4-SU-75-003	Sungai Mencirim , Jl. Tuanku Imam Bonjol Depan Makam Pahlawan Kec. Binjai Utara, Sumatera Utara, 20713	Sungai Mencirim		24 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kota Binjai	Sumatera Utara	'3.60938	'98.49298	4.73 CEMAR RINGAN	3.63 CEMAR RINGAN	2.21 CEMAR RINGAN	0.90 MEMENUHI
2	A4-SU-75-002	Sungai Bangkatan, Jl. Hos Cokroaminoto Pekan Binjai Kec. Binjai Kota Sumatera Utara, 20742	Sungai Bangkatan		24 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kota Binjai	Sumatera Utara	'3.60671	'98.48998	5.73 CEMAR SEDANG	4.61 CEMAR RINGAN	3.19 CEMAR RINGAN	1.06 CEMAR RINGAN
3	A4-SU-75-001	Sungai Bingai, Jl. Manggis, Limau Sundai Binjai Barat, Kota Binjai Sumatra Utara, 20743	Sungai Bingai		26 Juni 2025	AIR SUNGAI	Kota Binjai	Sumatera Utara	'3.60897	'98.48548	3.57 CEMAR RINGAN	2.94 CEMAR RINGAN	1.87 CEMAR RINGAN	0.80 MEMENUHI
Pemantauan 2														
1	A4-SU-75-001	Sungai Bingai, Jl. Manggis, Limau Sundai Binjai Barat, Kota Binjai Sumatra Utara, 20743	Sungai Bingai		22-Sep-25	AIR SUNGAI	Kota Binjai	Sumatera Utara	'3.60897	'98.48548	4.46 CEMAR RINGAN	3.10 CEMAR RINGAN	2.46 CEMAR RINGAN	0.96 MEMENUHI
2	A4-SU-75-002	Sungai Bangkatan, Jl. Hos Cokroaminoto Pekan Binjai Kec. Binjai Kota Sumatera Utara, 20742	Sungai Bangkatan		22-Sep-25	AIR SUNGAI	Kota Binjai	Sumatera Utara	'3.60671	'98.48998	8.60 CEMAR SEDANG	5.04 CEMAR SEDANG	3.94 CEMAR RINGAN	3.94 CEMAR RINGAN
3	A4-SU-75-003	Sungai Mencirim , Jl. Tuanku Imam Bonjol Depan Makam Pahlawan Kec. Binjai Utara, Sumatera Utara, 20713	Sungai Mencirim		22-Sep-25	AIR SUNGAI	Kota Binjai	Sumatera Utara	'3.60938	'98.49298	6.27 CEMAR SEDANG	3.22 CEMAR RINGAN	2.12 CEMAR RINGAN	1.60 CEMAR RINGAN

Hasil Pemantauan/Pengujian Kualitas Udara

No	Kode Lokasi	Alamat	Peruntukan	Kab/ Kota	Provinsi	Titik Koordinat		NILAI				
						Latitude	Longitude	IKU	KATEGORI	SO2	NO2	PM25
1	U1-SU-75-004	Kantor Walikota - Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kartini Binjai Kota	Perkantoran /Komersial	Kota Binjai	Sumatera Utara	'3.603303	'98.483288	'76.293116348672	SEDANG	'0.2823	'0.157222222222222	'0.998666666666667
2	U1-SU-75-003	Perumahan Bergam - Jl. Pratama No. 1	Pemukiman	Kota Binjai	Sumatera Utara	'3.598261	'98.470471	'79.137298915077	SEDANG	'0.1838	'0.086777777777778	'0.998666666666667
3	U1-SU-75-002	PT. Harjuna - Jl. Danau Laut Tawar No. 151 Sumber Karya Binjai Timur	Industri/Agro Industri	Kota Binjai	Sumatera Utara	'3.609081	'98.531348	'77.115974560419	SEDANG	'0.2292	'0.161444444444444	'0.998666666666667
4	U1-SU-75-001	Tugu Pejuang - Jl. Soekarno Hatta No. II Tanah Tinggi - Binjai	Transportasi	Kota Binjai	Sumatera Utara	'3.610376	'98.494978	'73.684249906472	SEDANG	'0.3306	'0.263888888888889	'0.998666666666667

Hasil Pemantauan/Pengujian Kualitas Lahan

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara	0.27	46.90	0.00	0.00	46.90

NO	JUMLAH TITIK RTH	JUMLAH TITIK TUPAN	KAB/KOTA	PROVINSI	NILAI PEMANTAUAN																								
					RTH ^(HA)	RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN) ^(HA)	Hutan lahan kering primer ^(HA)	Hutan lahan sekunder/bekas tebang an ^(HA)	Hutan mangrove primer ^(HA)	Hutan rawa primer ^(HA)	Hutan tanaman ^(HA)	Beluk ar ^(HA)	Perkebunan / Kebun ^(HA)	Permukiman / Lahan terbangun ^(HA)	Lahan terbuka ^(HA)	Savanna / Padang rumput ^(HA)	Tubuh air ^(HA)	Hutan mangrove sekunder/bekas tebang an ^(HA)	Hutan rawa sekunder/bekas tebang an ^(HA)	Beluk ar rawa ^(HA)	Pertanian lahan kering ^(HA)	Pertanian lahan kering cam pur semak / kebun cam pur ^(HA)	Sawah ^(HA)	Tambak ^(HA)	Ban dara / Pelabu han ^(HA)	Tran smig rasi ^(HA)	Perta mban gan ^(HA)	Ra wa ^(HA)	
1	43	0	Kota Binjai	Sumatera Utara	'51.5110340000001	'0	'0	'0	'0	'0	'0	'0	'0	'2160.1481879445	'4022.0383585237	'0	'0	'0	'0	'0	'0	'2474.9637765564	'0	'719.8571823815	'0	'0	'0	'0	'0

4. Analisis Sasaran Strategis 4: Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan.

Indikator 9

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)

Target Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) adalah 11,90% dan terealisasi 11,47%.

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Kinerja Urusan Industri Tahun 2021 s.d 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	11,45	11,61	11,47	11,47	11,47

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2026

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Binjai menunjukkan angka yang stabil pada tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025, yaitu berada pada poin 11,47.

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuhkan kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia.

Adapun jumlah industri dan potensi unggulan industri yang ada di Binjai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Jumlah Industri Kecil dan Menengah Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2023–2025

Kecamatan District	Jumlah Industri Total Industry		
	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Binjai Selatan	109	87	41
Binjai Kota	99	48	13
Binjai Timur	177	35	27
Binjai Utara	258	59	41
Binjai Barat	135	43	20
Kota Binjai	778	272	142

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2026

Terdapat penambahan 142 Industri Kecil dan Menengah yang ada di Kota Binjai, jadi total Industri Kecil dan Menengah Kota Binjai adalah 1.192.

Catatan: *angka 142 yang terdapat dalam Binjai Dalam Angka 2026 merupakan jumlah penambahan Industri Kecil dan Menengah, bukan merupakan akumulatif semua Industri Kecil dan Menengah di Kota Binjai.

Tabel 2.11
Potensi Produk Unggulan Industri di Kota Binjai, 2025

Jumlah Industri <i>Production Type</i>		Satuan <i>Unit</i>	Jumlah Produksi <i>Total Production</i>
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Ayaman Bambu Woven Bamboo	Buah/Unit	31.888
2	Sulaman Bordir Embroidered Edge	Buah/Piece	24.000
3	Mebel Bambu Furniture of Bamboo	Set/Set	1.420
4	Barang- Barang dari Tekstil Textile Goods	Buah/ Sheet	30.030.023
5	Kerupuk/Opak Crackers	Kg/ Kilogram	101.136
6	Tenun Weaving	Helai/ Sheet	656

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2026

Indikator 10

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)

Target Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) adalah 30,50% dan terealisasi 30,72%.

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2021 s.d 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	29,60	30,24	30,28	30,25	30,72

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2026

Potensi pengembangan sektor perdagangan harus bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Binjai yang bisa melalui peningkatan pelayanan maupun kualitas sarana prasarana pendukung sehingga akan bisa meningkatkan produktivitas pelaku dunia perdagangan yang akan memberikan sumbangan tambahan terhadap kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Binjai.

Adapun jumlah pasar, luas areal dan jumlah pedagang yang ada di Kota Binjai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Jumlah Pasar, Luas Areal, dan Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Binjai, 2025

Kecamatan <i>District</i>	Banyak Pasar <i>Market</i>	Luas Areal <i>Area (m²)</i>	Pedagang Lokal	Pedagang Non Lokal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binjai Selatan	1	19.295	-	-
Binjai Kota	9	90.335	2.000	140
Binjai Timur	-	-	-	-
Binjai Utara	1	1.000	200	51
Binjai Barat	1	1.500	20	60
Kota Binjai	12	112.130	2.220	251

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2026

Indikator 11

Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)

Target Kontribusi Sektor jasa terhadap PDRB (ADHB) adalah 41,58% dan terealisasi 33,48%.

Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.14
Kinerja Urusan Jasa Tahun 2021 s.d 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Kontribusi sektor Jasa terhadap PDRB	32,46	32,66	32,91	33,38	33,48

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2026

Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB Kota Binjai mengalami peningkatan mulai dari 32,46% pada tahun 2021 menjadi 33,48% pada tahun 2025.

Tabel 2.15
Distribusi PDRB Kota Binjai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2021 – 2025 (Persen)

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2,98	2,98	3,00	3,04	3,15
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	2,84	2,78	2,67	2,47	2,28
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	11,45	11,61	11,47	11,47	11,45
D Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
F Konstruksi/ <i>Construction</i>	12,45	12,08	12,04	11,79	11,18
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor vehicles and Motorcycles</i>	29,60	30,24	30,28	30,25	30,72
H Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	7,34	7,54	8,03	8,12	8,50
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	4,85	5,08	5,37	5,66	5,79
J Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	2,75	2,74	2,68	2,68	2,71
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance</i>	3,44	3,58	3,47	3,34	3,20
L Real Estate/ <i>Real Estate Activities</i>	7,97	7,86	7,41	7,37	7,52
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,84	0,87	0,89	0,88	0,92
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence, Compulsory Social Security</i>	6,93	6,39	6,48	6,74	6,39
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,69	4,45	4,41	4,37	4,32

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,09	1,05	1,05	1,06	1,11
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,53	0,52	0,53	0,53	0,54
	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Grass Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: BPS, Kota Binjai Dalam Angka 2026

1. Analisis Sasaran Strategis 5: Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Setra Industri Binjai.

Indikator 12

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Target tingkat pengangguran terbuka adalah 5,44% dan terealisasi 5,37%.

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 di Binjai sebesar 5,37 persen, menurun dibanding tahun 2024 (5,44 persen).

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT sebesar 5 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 5 orang merupakan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka terus mengalami penurunan pada kurun tahun 2021-2025. Hal ini sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terus mengalami kenaikan pada kurun tahun 2022-2025.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai terus menurun tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan,

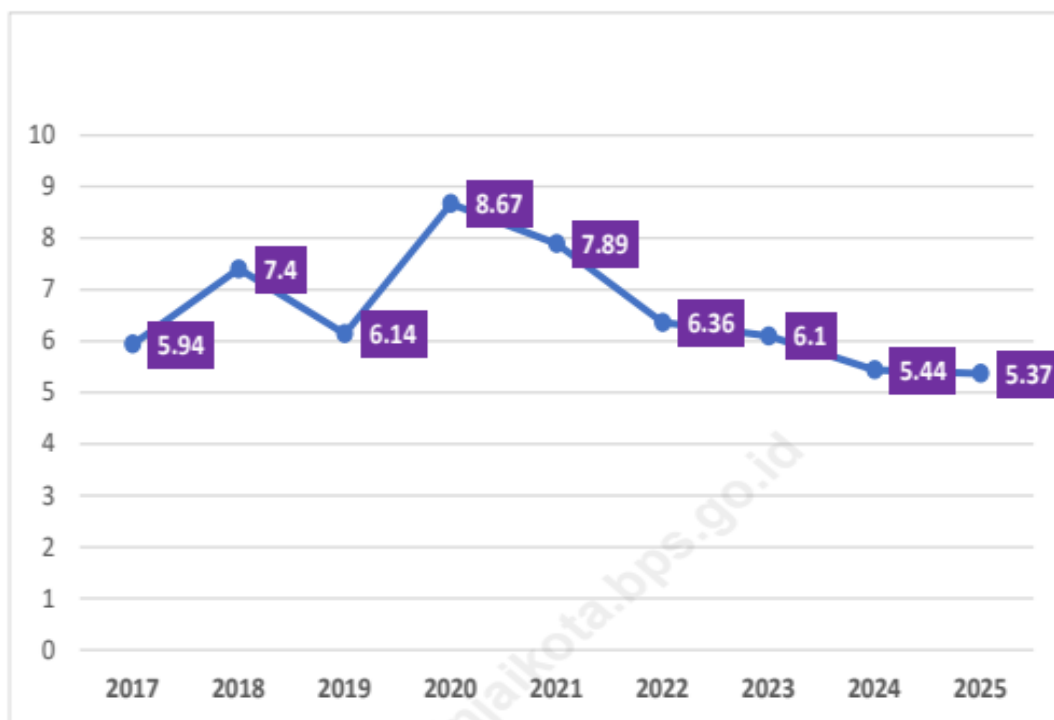
Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dalam meningkatkan penempatan dan perluasan kesempatan kerja, diantaranya:

Kerjasama yang dibina oleh Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai lembaga yang berperan dalam membantu pencari kerja dan perusahaan dalam mencari karyawan, BKK juga membantu menanamkan jiwa wirausaha pada para lulusannya. BKK biasanya dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan satuan pendidikan tinggi.

Melaksanakan Job Fair atau bursa kerja dimana kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat/pencari kerja untuk mendapatkan informasi lowongan kerja dan perekrutan tenaga kerja secara langsung.

Melaksanakan kegiatan karir on point sebagai wadah karir yang dapat membantu bagi pencari kerja menemukan jalur karir yang relevan dan langsung dengan cara perusahaan melakukan interview langsung dengan pencari kerja sehingga perusahaan dapat menemukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Grafik 2.1
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Binjai, 2017-2025



Sumber Data: BPS Kota Binjai, Kota Binjai Dalam Angka 2026

Tabel 2.16
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Binjai, 2017-2025

Tahun Years	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja <i>Economically Active Participation Rate</i>	Tingkat Pengangguran Terbuka <i>Unemployment Rate</i>
(1)	(2)	(3)
2017	62,03	5,94
2018	66,78	7,40
2019	66,89	6,14
2020	65,14	8,67
2021	62,77	7,86
2022	54,89	6,36
2023	62,79	6,10
2024	64,22	5,44
2025	64,86	5,37

Sumber Data: BPS Kota Binjai, Kota Binjai Dalam Angka 2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Binjai pada tahun 2025 mencapai 79,20, meningkat 0,53 poin dari tahun sebelumnya.

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{minRLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(PPP) - \ln(PPP_{min})}{\ln(PPP_{maks}) - \ln(PPP_{min})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel

Tabel 2.17
Nilai Minimum dan Maksimum Komponen Penyusun IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	20	85
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Perkembangan pembangunan manusia Kota Binjai secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. IPM Kota Binjai tahun 2021 sebesar 76,01 terus meningkat menjadi 79,20 pada tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Kota Binjai terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,5 persen per tahun. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai tahun 2025 mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2025 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Tabel 2.18**Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai, 2015 - 2025**

Tahun Year	Umur Harapan Hidup Life Expectancy	Harapan Lama Sekolah Expected years of schooling	Rata-rata Lama Sekolah Mean years of schooling	IPM Human Development Indicess
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	71,59	13,56	10,28	73,81
2016	71,67	13,57	10,28	74,11
2017	71,75	13,58	10,58	74,65
2018	71,95	13,59	10,75	75,21
2019	72,25	13,61	10,77	75,89
2020	72,38	13,62	10,93	75,89
2021	72,45	13,63	10,94	76,01
2022	72,79	13,87	11,18	76,95
2023	74,18	14,17	11,19	78,11
2024	74,45	14,18	11,20	78,67
2025	74,81	14,19	11,21	79,20

Sumber Data: BPS Kota Binjai, Kota Binjai Dalam Angka 2026

Capaian IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup di Kota Binjai pada tahun 2025 mencapai usia 74,81 tahun.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun ke atas di Kota Binjai telah menempuh pendidikan hingga 11,21 tahun atau setara dengan mencapai SMA kelas 11. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 14,19 tahun atau mencapai Diploma II.

Tidak kalah penting yaitu dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang disesuaikan sebesar 12.409 ribu rupiah.

5. Analisis Sasaran Strategis 6: Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.

Indikator 14

Indeks Pendidikan

Target Nilai Indikator kinerja Nilai Indeks Pendidikan adalah 76,72 dan terealisasi 76,78.

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

Pada tahun 2025, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kota Binjai sebesar 11,21 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Kota Binjai sudah duduk di kelas sebelas SMA. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7 tahun atau lebih) di Kota Binjai dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA) /Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah. Hal ini menunjukkan telah tercapainya target rata-rata lama bersekolah 9 tahun. Oleh karena itu, selain menjadikan hal ini sebagai Pekerjaan Rumah dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat tersampaikan dengan baik.

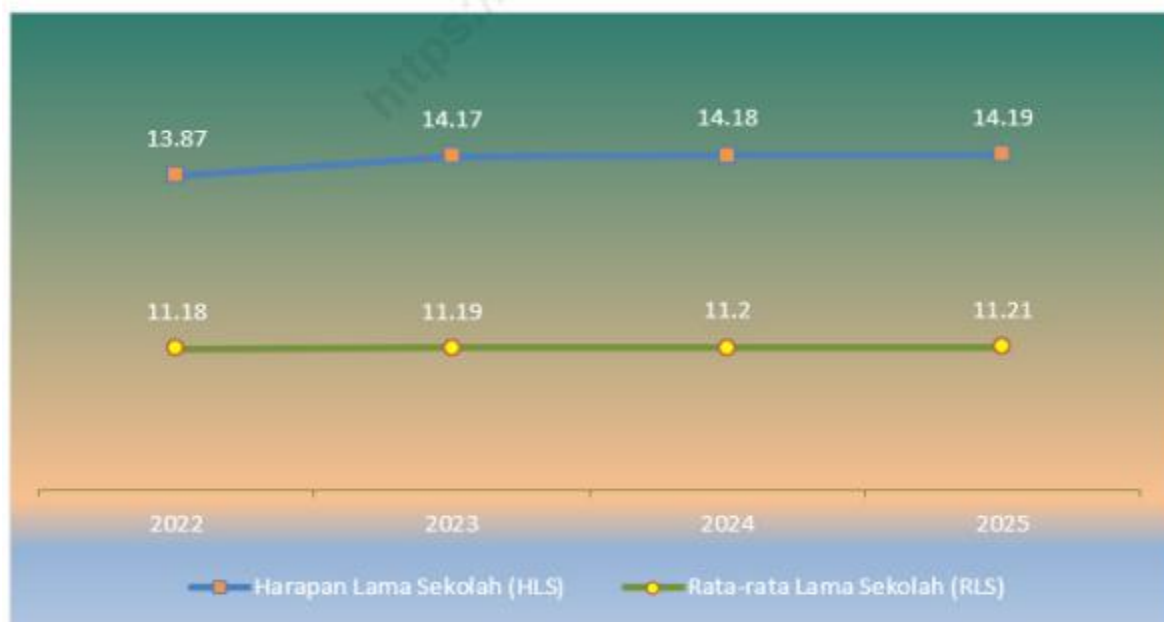
Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Harapan lama sekolah Kota Binjai pada tahun 2025 sebesar 14,19

tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 11,89 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi (tepatnya kuliah semester III).

Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa arah pembangunan pendidikan di Kota Binjai sudah tepat, yaitu memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Kota Binjai yang lebih berkualitas.

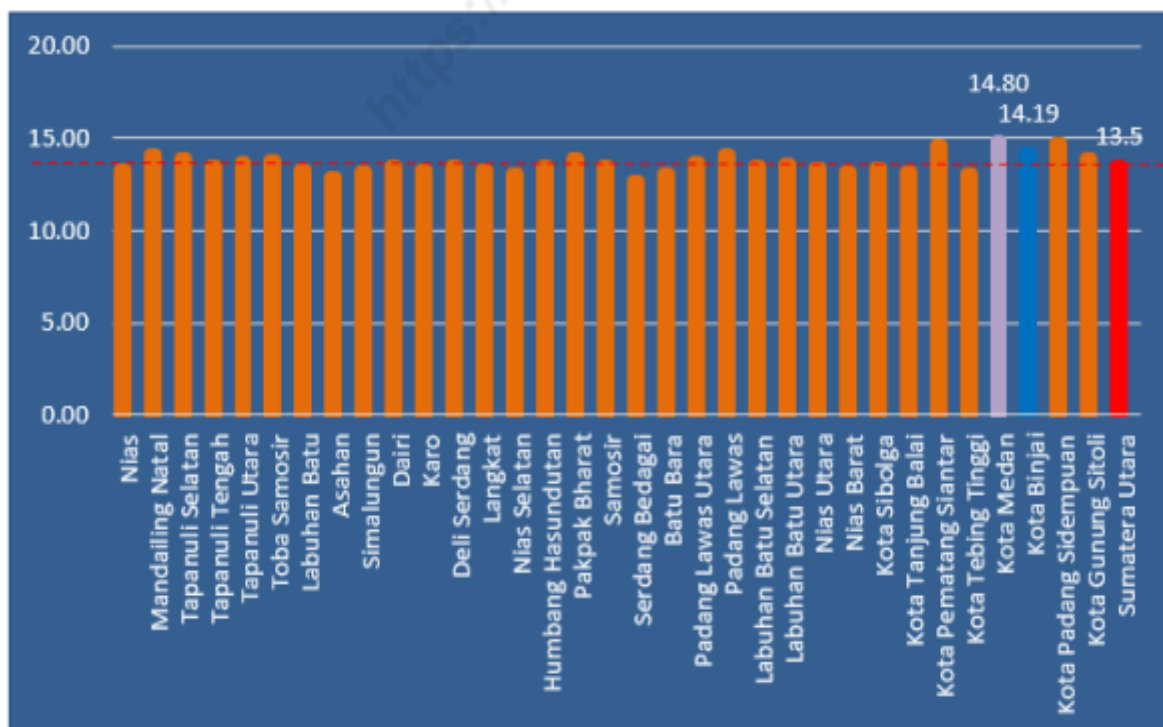
Grafik 2.2
Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Binjai, 2022 – 2025



Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2025

harapan lama sekolah tertinggi tahun 2025 di Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan sebesar 14,80 tahun. Harapan lama sekolah terendah di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Serdang Berdagai sebesar 12,66 tahun. Sedangkan, harapan lama sekolah Kota Binjai pada tahun 2025 sebesar 14,19 tahun, selisih 0,61 poin dengan Kota Medan dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka Provinsi Sumatera Utara yang secara umum sebesar 13,50 tahun. Kota Binjai menempati urutan ke-4 (empat) bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara.

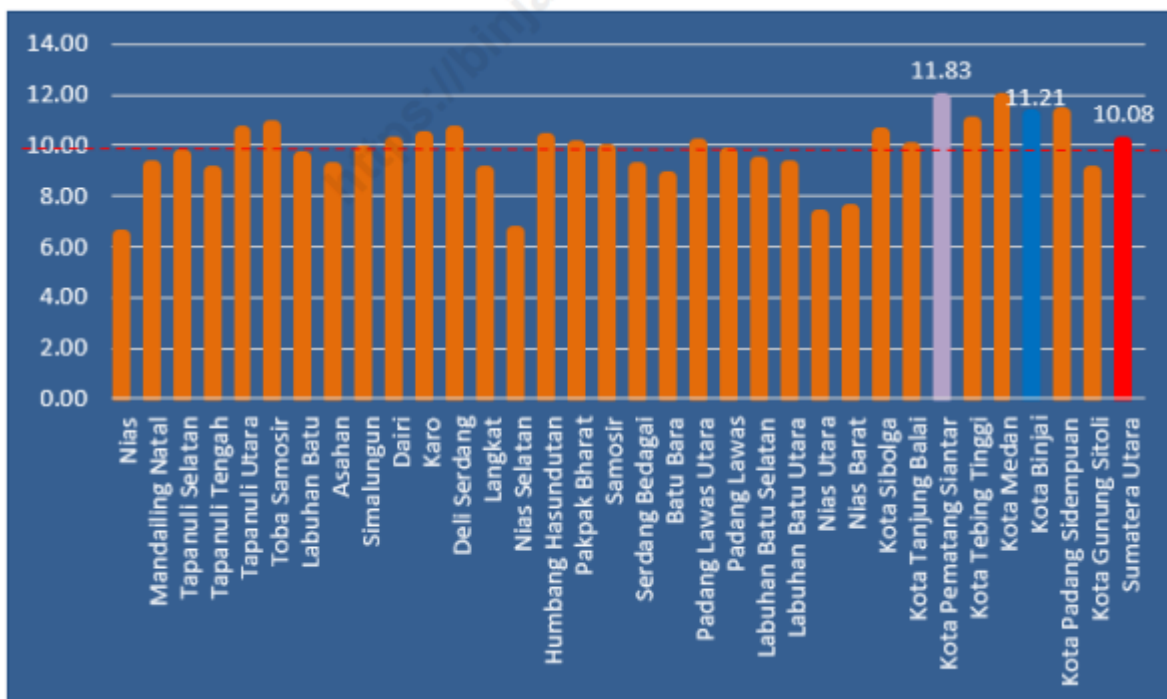
Grafik 2.3
Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara, 2025



Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2025

Pada tahun 2025, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kota Binjai sebesar 11,21 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Kota Binjai sudah duduk di kelas sebelas SMA. Rata-rata lama sekolah penduduk terlama di Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Pematang Siantar sebesar 11,83 tahun, sedangkan Kota Medan menempati posisi kedua mencapai 11,80 tahun. Sedangkan, Kabupaten Nias menduduki peringkat terakhir dengan rata-rata lama sekolah sebesar 6,41 tahun. Angka rata-rata lama sekolah pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 sebesar 10,08 tahun dimana 1,13 tahun lebih cepat bila dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Kota Binjai secara umum. Secara umum rata-rata lama sekolah penduduk Kota Binjai menduduki ranking ke-4 (ke-empat) di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 2.4
Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara, 2025



Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2025

6. Analisis Sasaran Strategis 7: Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan.

Indikator 15

Indeks Kesehatan

Target Indeks Kesehatan Kota Binjai adalah 83,77 dan terealisasi 84,32.

Indeks Kesehatan menggambarkan dimensi dari umur panjang dan hidup sehat. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup di Kota Binjai pada tahun 2025 mencapai usia 75,54 tahun. Berarti setiap bayi di Kota Binjai yang dilahirkan pada tahun 2025, dapat berharap untuk hidup sampai usia 75,54 tahun. Selama tahun 2022-2025, umur harapan hidup saat lahir di Kota Binjai tumbuh rata-rata 0,40 persen per tahun.

Sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan

penduduk secara makro adalah umur harapan hidup waktu lahir. Umur harapan hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diharapkan dapat meningkatkan umur harapan penduduk. Semakin tinggi umur harapan hidup menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara makro semakin tinggi.

Grafik 2.5
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Binjai, 2022– 2025



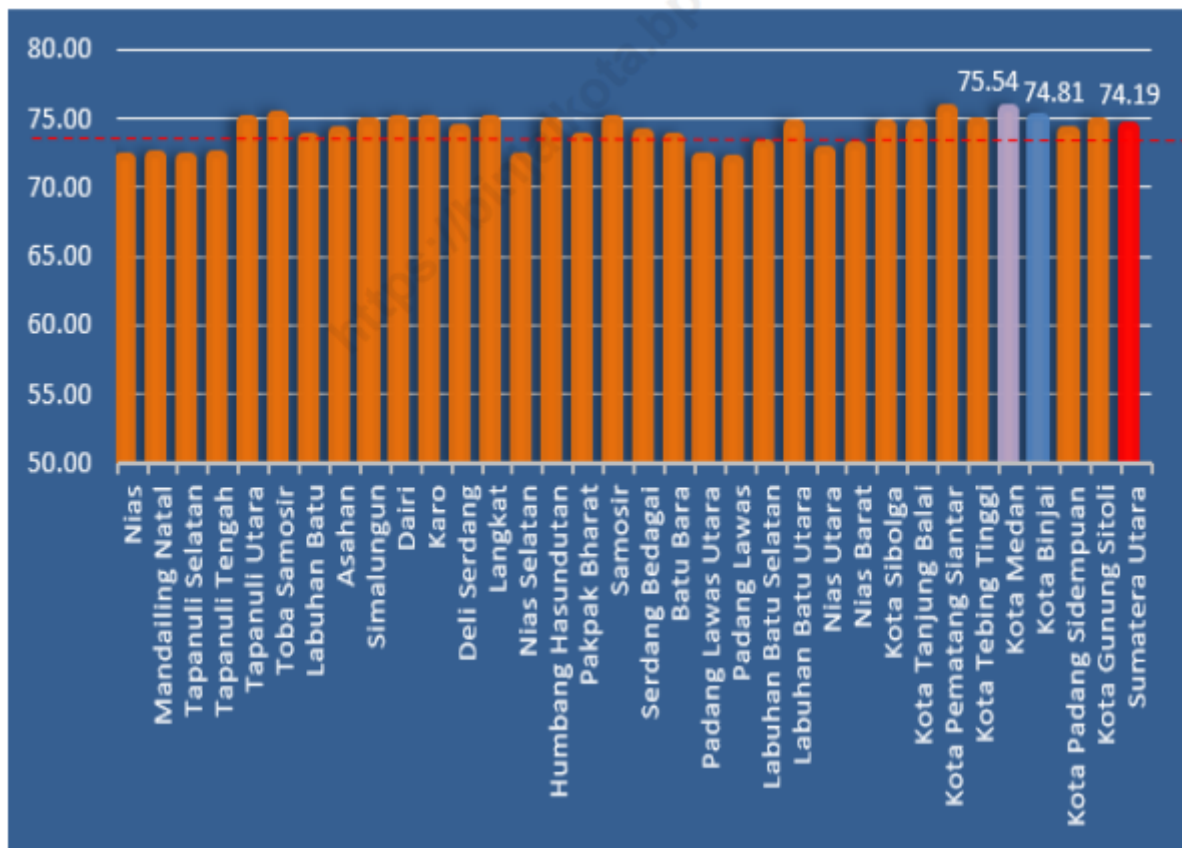
Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2025

Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

Umur harapan hidup tertinggi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 adalah Kota Medan sebesar 75,54 tahun, sedangkan

terendah adalah Kabupaten Padang Lawas sebesar 71,87 tahun. Umur harapan hidup penduduk Kota Binjai tercatat 75,54 tahun yang berarti penduduk Kota Binjai yang baru lahir pada tahun 2025 mempunyai harapan yang besar untuk mencapai umur 75,54 tahun. Bila dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Utara secara umum, penduduk Sumatera Utara secara umum mempunyai peluang untuk hidup 0,62 tahun lebih pendek dari penduduk Kota Binjai. Umur harapan hidup Kota Binjai tahun 2025 menempati peringkat ke-4 (keempat) di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara..

Grafik 2.6
Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/kota
Provinsi Sumatera Utara, 2025



Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2025

7. Analisis Sasaran Strategis 8: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

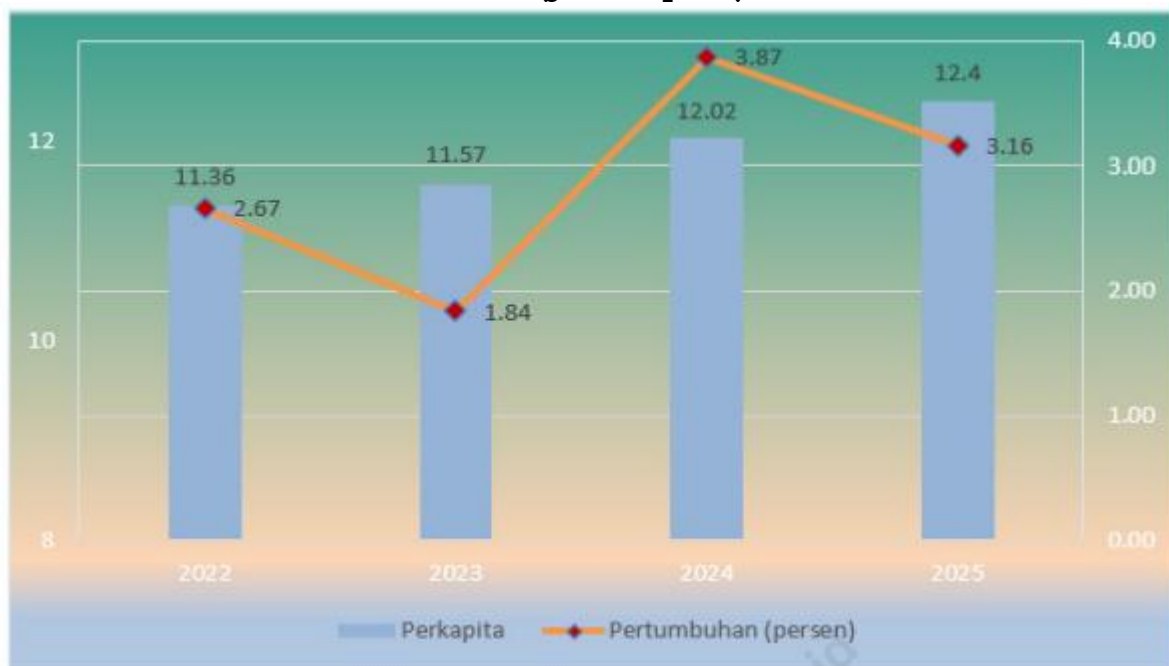
Indikator 16

Indeks Pengeluaran

Target Nilai Indikator kinerja Nilai Indeks Pengeluaran adalah 79,73 dan terealisasi 76,73.

Tahun 2025, pengeluaran per kapita penduduk Kota Binjai telah mencapai 12,40 juta per tahun. Pada Tahun 2022 tingkat daya beli masyarakat Kota Binjai sebesar 11,36 juta rupiah per kapita per tahun, meningkat menjadi 11,56 juta rupiah per kapita per tahun pada tahun 2023. Kemampuan daya beli masyarakat Kota Binjai selama periode 2022-2025 terus meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan periode 2022-2025 sekitar 2,88 persen per tahun.

Grafik 2.7
Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun Kota Binjai, 2022-2025 (juta rupiah)

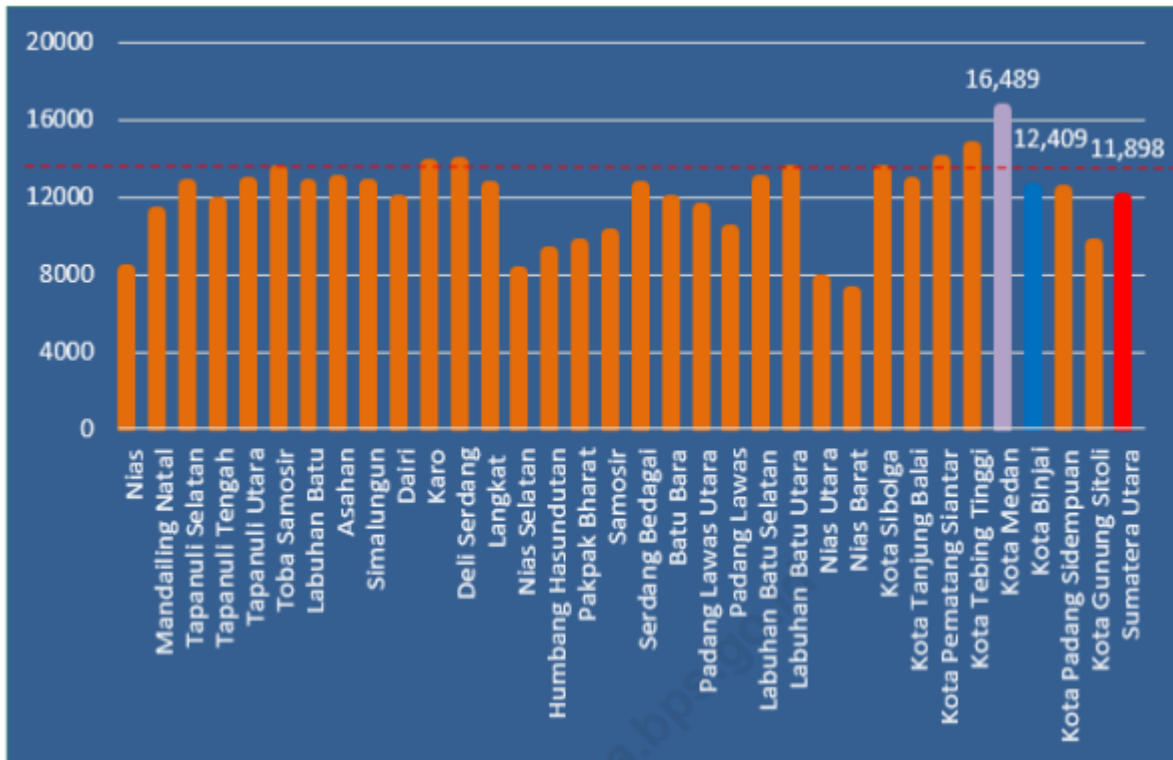


Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2025

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan tertinggi Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 adalah Kota Medan sebesar 16.489 ribu rupiah, dan terendah adalah Kabupaten Nias Barat sebesar 7.032 ribu rupiah. Sedangkan, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Kota Binjai adalah 12.409 ribu rupiah pada tahun 2025.

Untuk daya beli penduduk Kota Binjai pada tahun 2025 masih lebih tinggi dari penduduk Sumatera Utara pada umumnya yaitu sebesar 11.898 ribu rupiah. Dari gambar 3.5 dapat dilihat daya beli Kota Binjai menempati urutan ke18 (ke delapan belas) dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Grafik 2.8
Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan) Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara, 2025 (ribu rupiah)



Sumber Data: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai 2025

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2024 dan 2023

Sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, salah satu informasi yang harus disampaikan pada Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja ini adalah Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan tahun 2023. Perbandingan kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2024 dan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Realisasi 2024	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	$\frac{(7)}{(6)/(5)}$	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB (70)	B (66,67*)	95%	B	B
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	75,00	78,73	105%	74,52*	72,56
		Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3,38	2,7697*	82%	2,6671*	2,32*
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	86 (B)	83,8 (B)	97%	83,3 (B)	78 (B)
		Persentase kondisi jalan baik	Persen	95,00	71,00	75%	90,00	83,00
		Persentase akses air minum kota	Persen	100	98,50	98,50%	100	98,05
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,00	66,36	104%	60,81	59,33
4	Meningkatnya peranan	Kontribusi Sektor Industri	Persen	11,90	11,47	96%	11,47	11,47

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Realisasi 2024	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)
	sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	terhadap PDRB (ADHB)						
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	30,50	30,72	101%	30,25	30,28
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41,80	33,48	80%	33,38	32,99
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,44	5,37	101%	5,44	6,10
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	76,72	76,78	100%	76,66	76,66

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Realisasi 2024	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	83,77	84,32	101%	83,77	83,35
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	79,73	76,73	96%	75,76	74,58

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

Sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, salah satu informasi yang harus disampaikan pada Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja ini adalah Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/ RPJMD.

Berikut ini adalah Tabel penjabaran target dan capaian Kinerja Tahun 2025 dengan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021- 2026:

Tabel 2.20 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Target 2026 (RPJMD 2021-2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB (70)	B (66,67)	95	BB
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	75,00	78,73	105	81
		Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3,38	2,7697*	82	3,40
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	86	83,8	97	89 (A)
		Persentase kondisi jalan baik	Persen	95,00	71	75	96
		Persentase akses air minum kota	Persen	100	98,50	98,50	60
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,00	66,36	104	68,7

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Target 2026 (RPJMD 2021-2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)
4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11,90	11,47	96	12,0
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	30,50	30,72	101	30,7
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41,80	33,48	80	42
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,44	5,37	101	6,0
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	76,72	76,78	100	76,96

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Target 2026 (RPJMD 2021-2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	83,77	84,32	101	82,68
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	79,73	76,73	96	81,43

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya.

d. **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi**

penjabaran realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi dapat dilihat pada tabel 2.25

Tabel 2.21 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional/provinsi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Standar Nasional/Provinsi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B	BB	83%
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	78,73	79,94	98%
		Nilai Evaluasi LPPD	Poin	2,7697*	2,9354*	94%
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	83,8		
		Persentase kondisi jalan baik	Persen	71	91	78%
		Persentase akses air minum kota	Persen	98,50	93,24	106%
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,36	78,31	85%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Standar Nasional/Provinsi	Capaian (%)
4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomikreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11,47	18,39	62%
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	30,72	18,97	162%
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	33,48	19,4	173%
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,37	5,32	99%
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	76,78	71,10	108%
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	84,32	83,37	101%
8	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	76,73	75,45	102%

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya

= Standar yang digunakan merupakan capaian provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kota Binjai berada pada peringkat ke 13 dari dari 33 daerah Kota/Kabupaten se Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2.1
Hasil LPPD Pemerintah Daerah Tahun 2024

KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA			
Kode	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
12.01	Kabupaten Tapanuli Tengah	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
12.02	Kabupaten Tapanuli Utara	3,0859	Sedang
12.03	Kabupaten Tapanuli Selatan	2,7982	Sedang
12.04	Kabupaten Nias	2,8295	Sedang
12.05	Kabupaten Langkat	3,0093	Sedang
12.06	Kabupaten Karo	1,6907	Sangat Rendah
12.07	Kabupaten Deli Serdang	1,9843	Rendah
12.08	Kabupaten Simalungun	1,4495	Sangat Rendah
12.09	Kabupaten Asahan	3,2983	Sedang
12.10	Kabupaten Labuhanbatu	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
12.11	Kabupaten Dairi	2,2107	Rendah
12.12	Kabupaten Toba	2,9498	Sedang
12.13	Kabupaten Mandailing Natal	2,3095	Rendah
12.14	Kabupaten Nias Selatan	2,0476	Rendah
12.15	Kabupaten Pakpak Bharat	2,7436	Sedang
12.16	Kabupaten Humbang Hasundutan	2,8725	Sedang
12.17	Kabupaten Samosir	2,5682	Rendah
12.18	Kabupaten Serdang Bedagai	3,2444	Sedang
12.19	Kabupaten Batubara	3,2823	Sedang
12.20	Kabupaten Padang Lawas Utara	Tidak Dinilai	Tidak Dinilai
12.21	Kabupaten Padang Lawas	1,0063	Sangat Rendah
12.22	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2,4850	Rendah
12.23	Kabupaten Labuhanbatu Utara	3,0511	Sedang
12.24	Kabupaten Nias Utara	2,3478	Rendah
12.25	Kabupaten Nias Barat	2,3762	Rendah
12.71	Kota Medan	3,6109	Tinggi
12.72	Kota Pematangsiantar	2,4672	Rendah
12.73	Kota Sibolga	2,6483	Sedang
12.74	Kota Tanjungbalai	2,7206	Sedang
12.75	Kota Binjai	2,7697	Sedang
12.76	Kota Tebing Tinggi	2,9901	Sedang
12.77	Kota Padangsidempuan	1,6850	Sangat Rendah
12.78	Kota Gunungsitoli	2,6691	Sedang

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Binjai berada pada peringkat ke 28 dari dari 33 daerah Kota/Kabupaten se Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.22
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
di Sumatera Utara, 2025

No	Kabupaten/Kota	IKA		IKU		IKL		IKLH		Rating
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Asahan	74.65	78.27	81.07	79.00	65.50	67.30	75.25	76.16	SEDANG
2	Batubara	70.67	78.91	80.17	75.60	55.19	60.83	71.13	73.61	SEDANG
3	Dairi	74.61	73.96	83.79	86.18	68.08	81.14	76.90	80.48	SEDANG
4	Deli Serdang	75.65	69.59	75.23	77.71	62.05	62.37	72.50	71.30	SEDANG
5	Humbang Hasundutan	73.30	72.56	81.82	84.93	80.46	82.69	78.32	79.79	SEDANG
6	Karo	82.29	77.37	81.30	72.12	70.16	73.19	79.23	74.33	SEDANG
7	Labuhanbatu	75.00	68.80	80.24	81.01	61.43	61.32	74.15	72.11	SEDANG
8	Labuhanbatu Selatan	75.80	80.42	82.95	81.47	64.44	64.24	76.21	77.30	SEDANG
9	Labuhanbatu Utara	76.13	65.99	82.56	80.51	65.93	66.24	76.50	71.92	SEDANG
10	Langkat	85.00	75.30	81.61	80.08	77.63	77.71	82.01	77.76	SEDANG
11	Mandailing Natal	77.31	81.20	84.37	86.71	81.80	82.66	81.15	83.75	SEDANG
12	Nias	74.83	84.30	84.94	87.68	68.59	68.34	77.56	82.17	SEDANG
13	Nias Barat	72.74	0.00	85.73	88.57	59.22	59.08	75.04	48.81	BURUK
14	Nias Selatan	74.44	0.00	84.37	86.90	78.74	78.51	79.40	52.39	BURUK
15	Nias Utara	71.38	0.00	84.92	87.83	63.39	63.24	75.11	49.42	BURUK
16	Padang Lawas	69.33	70.75	83.53	86.15	72.73	72.90	75.83	77.46	SEDANG
17	Padang Lawas Utara	72.44	67.47	83.46	84.68	64.70	65.81	75.21	74.08	SEDANG
18	Pakpak Barat	75.80	84.91	84.89	87.90	92.70	94.64	83.18	88.25	BAIK
19	Samosir	80.57	77.18	82.40	86.46	62.59	63.48	77.37	77.94	SEDANG
20	Serdang Bedagai	76.42	69.96	79.15	77.29	59.76	59.53	73.88	70.64	SEDANG
21	Simalungun	71.64	72.67	83.55	83.86	62.51	64.56	74.46	75.42	SEDANG
22	Tapanuli Selatan	87.92	0.00	83.90	87.25	78.06	79.99	84.13	52.85	BURUK
23	Tapanuli Tengah	85.72	81.56	83.65	84.27	71.69	72.92	81.81	80.77	SEDANG
24	Tapanuli Utara	74.16	77.47	82.80	85.23	82.61	85.75	79.51	82.43	SEDANG
25	Toba	73.45	73.66	81.69	84.72	72.66	74.69	76.61	78.37	SEDANG
26	Binjai	82.89	66.71	80.82	76.56	46.99	46.90	74.19	66.36	SEDANG
27	Gunung Sitoli	83.33	68.27	84.14	87.01	60.68	60.53	78.70	74.16	SEDANG
28	Medan	72.19	73.74	79.84	75.91	38.37	40.63	67.88	67.37	SEDANG
29	Padang Sidempuan	82.91	72.09	81.63	84.68	54.29	57.06	76.12	73.90	SEDANG
30	Pematang Siantar	77.11	74.96	79.45	80.14	47.58	49.03	71.59	71.38	SEDANG
31	Sibolga	79.67	79.42	81.92	83.70	47.22	52.07	73.47	75.16	SEDANG
32	Tanjung Batai	70.74	69.94	81.59	77.33	48.06	54.64	70.17	69.58	SEDANG
33	Tebing Tinggi	68.39	66.64	80.42	77.20	42.51	44.01	67.59	65.96	SEDANG

Sumber Data: <https://sitala.kemenvh.go.id/iklh/login>

Berdasarkan data BPS yang termuat dalam Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025, Tingkat Pengganguran Terbuka Kota Binjai adalah lebih besar 0,05 persen dari Provinsi Sumatera Utara. Untuk Kota Binjai di tingkat provinsi Sumatera Utara berada di peringkat 20 dari 33 Kabupaten/Kota.

Tabel 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)) Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara, 2024-2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	TPT/UR			
	Feb	Agt	Feb	Agt
	Feb	Aug	Feb	Aug
	2024	2025	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
01 Nias	—	...	2,10	2,08
02 Mandailing Natal	—	...	7,22	7,18
03 Tapanuli Selatan	—	...	3,41	3,35
04 Tapanuli Tengah	—	...	7,45	7,21
05 Tapanuli Utara	—	...	1,21	NA
06 Toba	—	...	1,09	1,00
07 Labuhanbatu	—	...	5,90	5,53
08 Asahan	—	...	5,94	5,46
09 Simalungun	—	...	5,17	4,48
10 Dairi	—	...	1,43	1,21
11 Karo	—	...	2,40	1,93
12 Deli Serdang	—	...	8,02	7,69
13 Langkat	—	...	6,08	5,85
14 Nias Selatan	—	...	3,03	2,98
15 Humbang Hasundutan	—	...	0,92	NA
16 Pakpak Bharat	—	...	0,97	0,91
17 Samosir	—	...	0,89	0,87
18 Serdang Bedagai	—	...	4,88	4,31
19 Batu Bara	—	...	5,75	5,44
20 Padang Lawas Utara	—	...	3,99	3,73
21 Padang Lawas	—	...	5,47	5,03
22 Labuhanbatu Selatan	—	...	3,24	3,19
23 Labuhanbatu Utara	—	...	4,60	4,21
24 Nias Utara	—	...	2,82	2,40
25 Nias Barat	—	...	1,00	0,97
Kota/Municipality				
71 Sibolga	—	...	6,52	6,44
72 Tanjungbalai	—	...	4,08	3,81
73 Pematangsiantar	—	...	8,00	7,74
74 Tebing Tinggi	—	...	6,18	5,99
75 Medan	—	...	8,13	7,99
76 Binjai	—	...	5,44	5,37
77 Padang Sidempuan	—	...	7,17	7,00
78 Gunungsitoli	—	...	3,30	3,29
Sumatera Utara	5,10	5,05	5,60	5,32

Sumber Data: BPS, Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025

Berdasarkan data BPS yang termuat dalam Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2025, Indeks Pembangunan Kota Binjai berada di urutan ke 4 dari seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara. Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai lebih besar 2,73 poin dari Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara. dari Indeks Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.24
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
01 Nias	64,30	65,15	66,13	66,79
02 Mandailing Natal	72,17	72,65	73,44	74,26
03 Tapanuli Selatan	73,96	74,58	75,18	75,78
04 Tapanuli Tengah	72,18	72,77	73,34	73,97
05 Tapanuli Utara	76,43	76,86	77,48	78,09
06 Toba	77,58	77,83	78,44	79,17
07 Labuhanbatu	73,96	74,70	75,20	75,79
08 Asahan	73,18	73,59	74,17	75,13
09 Simalungun	74,68	75,17	75,88	76,48
10 Dairi	74,60	75,18	75,88	76,68
11 Karo	76,37	76,88	77,49	78,10
12 Deli Serdang	76,86	77,16	77,56	78,29
13 Langkat	74,03	74,33	74,85	75,58
14 Nias Selatan	64,05	64,98	65,87	66,74
15 Humbang Hasundutan	72,05	72,49	73,33	73,93
16 Pakpak Bharat	71,57	72,30	73,09	73,89
17 Samosir	72,57	72,93	73,77	74,63
18 Serdang Bedagai	72,89	73,40	74,15	74,69
19 Batu Bara	71,75	72,56	73,14	73,92
20 Padang Lawas Utara	72,77	73,45	74,16	75,12
21 Padang Lawas	71,41	72,16	73,10	73,90
22 Labuhanbatu Selatan	73,59	74,23	75,11	75,74
23 Labuhanbatu Utara	74,61	75,45	76,20	76,71
24 Nias Utara	64,55	65,44	66,42	67,38
25 Nias Barat	63,96	64,68	65,66	66,65
Kota/Municipality				
71 Sibolga	76,69	77,07	77,52	78,11
72 Tanjungbalai	74,73	75,42	75,95	76,70
73 Pematangsiantar	79,71	80,46	81,17	81,71
74 Tebing Tinggi	77,39	78,17	78,68	79,26
75 Medan	82,13	82,61	83,23	83,74
76 Binjai	77,50	78,11	78,67	79,20
77 Padangsidempuan	77,73	78,10	78,61	79,19
78 Gunungsitoli	71,11	71,55	72,30	73,29
Sumatera Utara	74,51	75,13	75,76	76,47

Sumber Data: BPS, Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

Menurut Komponen Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan Kota Binjai lebih besar 5,68 poin dari Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan untuk Indeks Kesehatan Kota Binjai lebih besar 0,95 poin dari Indeks Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Begitupun dengan Indeks Pengeluaran Kota Binjai lebih besar 1,28 poin

Tabel 2.25
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Utara, 2025

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Komponen IPM/Component of HDI			
	Umur Harapan Hidup <i>Life Expectancy</i> (UHM)	Harapan Lama Sekolah <i>Expected</i> <i>Years of Schooling</i> (EYS)	Rata-rata Lama Sekolah/ <i>Mean Years of</i> <i>Schooling</i> (MYS)	Pengeluaran per Kapita <i>Expenditure per</i> <i>Capita Adjusted</i> (Rp.000,-) ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
01 Nias	72,04	13,32	6,41	8.115
02 Mandailing Natal	72,06	14,10	9,17	11.100
03 Tapanuli Selatan	71,97	13,90	9,60	12.557
04 Tapanuli Tengah	72,20	13,51	8,93	11.687
05 Tapanuli Utara	74,70	13,75	10,50	12.643
06 Toba	74,98	13,82	10,78	13.333
07 Labuhanbatu	73,45	13,30	9,53	12.537
08 Asahan	73,93	12,84	9,06	12.760
09 Simalungun	74,59	13,16	9,74	12.585
10 Dairi	74,71	13,54	10,09	11.794
11 Karo	74,71	13,27	10,30	13.583
12 Deli Serdang	74,02	13,46	10,50	13.697
13 Langkat	74,72	13,29	8,95	12.452
14 Nias Selatan	71,92	13,12	6,61	8.082
15 Humbang Hasundutan	74,55	13,47	10,26	9.097
16 Pakpak Bharat	73,35	13,92	9,94	9.462
17 Samosir	74,68	13,53	9,81	10.057
18 Serdang Bedagai	73,76	12,66	9,13	12.429
19 Batu Bara	73,40	13,13	8,71	11.747
20 Padang Lawas Utara	71,94	13,73	10,05	11.371
21 Padang Lawas	71,87	14,11	9,64	10.258
22 Labuhanbatu Selatan	73,01	13,54	9,29	12.797
23 Labuhanbatu Utara	74,45	13,59	9,15	13.347
24 Nias Utara	72,48	13,38	7,25	7.606
25 Nias Barat	72,82	13,17	7,43	7.032
Kota/Municipality				
71 Sibolga	74,38	13,44	10,46	13.317
72 Tanjungbalai	74,40	13,16	9,90	12.726
73 Pematangsiantar	75,42	14,62	11,83	13.783
74 Tebing Tinggi	74,58	13,14	10,88	14.499
75 Medan	75,54	14,80	11,80	16.489
76 Binjai	74,81	14,19	11,21	12.409
77 Padangsidimpuan	73,97	14,72	11,22	12.274
78 Gunungsitoli	74,47	13,95	8,95	9.477
Sumatera Utara	74,19	13,50	10,08	11.898

Sumber Data: BPS, Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, 2025

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dalam standar pengukuran nasional, suatu kinerja dikatakan berhasil jika rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran tersebut berada di atas 90% dari yang ditargetkan. Dan jika dilihat dari capaian kinerja yang disajikan pada tabel maka 8 (delapan) sasaran dapat dikatakan berhasil dikarenakan rata-rata capaian indikator pada sasaran tersebut berada di atas 90%. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.26
Sasaran dengan rata-rata capaian indikator di atas 90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rata-rata capaian indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	B	95%	95,5%
		Opini BPK	WTP	WTP	100%	
		Indeks Profesionalitas ASN	75,00	78,73	105%	
		Nilai Evaluasi LPPD	3,38	2,7697*	82%	
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	86(B)	83,8 (B)	97%	90%
		Persentase Kondisi Jalan Baik	95,00	71	75%	
		Persentase akses air minum kota	100	98,50	98,50%	
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,00	66,36	104%	104%
4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	11.90	11.47	96%	92%
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	30,50	30.72	101%	
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	41.80	33,48	80%	
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,44	5,37	101%	101%

6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	76,72	76,78	100%	100%
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	83,77	84,32	101%	101%
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	79,73	76,73	96%	96%

Keterangan:

* = Nilai realisasi menggunakan hasil pengukuran tahun-tahun sebelumnya

Jika dilihat dari tabel di atas, maka keseluruhan sasaran berhasil, ini berarti dapat dikatakan, program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Binjai telah mampu secara efektif menyentuh permasalahan di masyarakat.

Jika dilihat dari tabel di atas, maka ada beberapa indikator yang masih jauh dari yang ditargetkan, yaitu Nilai Evaluasi LPPD, hanya mendapat Poin 2,7697* dari Poin 3,38 yang ditargetkan, walaupun angka 2,7697* adalah Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Indikator Persentase Kondisi Jalan Baik juga jauh dari yang ditargetkan, dimana targetnya 95% dan yang terealisasi hanya 75%.

Begitupun dengan indikator Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB), yaitu hanya mendapat 33,48 persen dari 41,80 persen yang ditargetkan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

12 (dua belas) sasaran kinerja memiliki realisasi kinerja di atas 90% maka dapat dikatakan program/kegiatan yang dilakukan sudah efektif dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang diperjanjikan di tahun 2025. Adapun program yang menunjang keberhasilan per sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27
Sasaran dengan rata-rata capaian indikator di atas 90% dan program yang mendukung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGARAAN PENGAWASAN PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		Opini BPK	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		Indeks Profesionalitas ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung Pencapaian
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIANDAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		Persentase akses air minum kota	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung Pencapaian
4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung Pencapaian
6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PER ORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung Pencapaian
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

g. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran per program pada Pemerintah Kota Binjai adalah sebagaiberikut:

Tabel 2.28
Realisasi Anggaran per Program Tahun 2025

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 644,847,017,115.22	Rp 583,018,447,898.56	90%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 79,293,106,358.00	Rp 63,571,140,578.13	80%

3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 4,996,256,098.00	Rp 4,488,854,295.00	90%
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 83,702,734,655.00	Rp 78,519,800,019.00	94%
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 951,636,804.00	Rp 697,907,405.00	73%
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 517,233,000.00	Rp 433,314,488.00	84%
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 703,702,846.00	Rp 57,200,000.00	8%
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 5,431,757,000.00	Rp 2,235,345,850.00	41%
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 8,492,813,000.00	Rp 8,390,238,130.00	99%
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 3,531,225,006.00	Rp 3,879,225,836.00	110%
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 5,014,550,489.00	Rp 2,263,828,300.00	45%
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 19,638,564,890.00	Rp 24,288,012,197.00	124%
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 9,860,976,765.00	Rp 3,483,952,985.00	35%
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 565,572,814.00	Rp 83,690,435.00	15%
15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 524,185,545.60	Rp 282,214,717.00	54%
16	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 273,600,000.00	Rp 0.00	0%

18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 4,862,728,550.00	Rp 7,983,087,593.00	164%
19	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp 20,000,000.00	Rp 0.00	0%
20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 7,526,400,000.00	Rp 9,241,361,993.00	123%
21	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 4,246,720,512.00	Rp 4,232,157,356.00	100%
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 48,000,000.00	Rp 40,800,000.00	85%
23	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 110,003,646.26	Rp 103,562,969.00	94%
24	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 151,061,762.00	Rp 52,721,500.00	35%
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 409,738,604.00	Rp 337,615,464.00	82%
26	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 89,731,697.14	Rp 81,675,261.00	91%
27	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 136,611,672.00	Rp 19,778,400.00	14%
28	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 226,525,846.00	Rp 139,292,680.00	61%
29	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 53,883,672.00	Rp 300,293,400.00	557%
30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 2,531,965,262.00	Rp 1,548,103,678.00	61%
31	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 62,399,258.00	Rp 22,048,200.00	35%

32	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 49,211,672.00	Rp 46,978,400.00	95%
33	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 127,282,600.00	Rp 90,609,400.00	71%
34	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 120,522,010.00	Rp 115,381,600.00	96%
35	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 69,414,972.00	Rp 53,895,600.00	78%
36	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 11,033,699.00	Rp 10,846,199.00	98%
37	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 391,060,520.00	Rp 293,425,477.00	75%
38	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp 381,213,690.00	Rp 162,942,352.00	43%
39	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 9,394,944.00	Rp 6,944,944.00	74%
40	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 216,584,842.00	Rp 99,010,601.00	46%
41	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 183,779,500.00	Rp 131,653,000.00	72%
42	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 1,886,933,011.00	Rp 1,770,848,525.00	94%
43	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 70,922,702.97	Rp 26,072,650.00	37%
44	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 837,553,923.01	Rp 709,301,075.00	85%

45	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 48,701,395.18	Rp 26,615,760.00	55%
46	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 24,405,371.31	Rp 9,063,300.00	37%
47	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 104,681,630.40	Rp 51,380,500.00	49%
48	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 8,845,277.76	Rp 129,200,000.00	1461%
49	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 205,498,579.96	Rp 191,307,647.00	93%
50	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 129,999,732.96	Rp 120,151,000.00	92%
51	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp 1,551,050,115.00	Rp 1,853,638,505.00	120%
52	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp 106,599,565.50	Rp 95,506,897.00	90%
53	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp 38,919,080.85	Rp 17,324,825.00	45%
54	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 7,971,339,134.54	Rp 8,827,901,832.00	111%
55	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 451,423,500.00	Rp 462,536,000.00	102%
56	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 27,520,000.00	Rp 0.00	0%

57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 12,270,000.00	Rp 5,205,000.00	42%
58	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 614,210,429.00	Rp 352,187,050.00	57%
59	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 2,620,257,147.00	Rp 2,364,425,312.00	90%
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 1,148,825,000.00	Rp 1,201,819,685.00	105%
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 5,247,023,510.00	Rp 5,533,550,504.00	105%
62	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 2,352,985,870.50	Rp 2,541,461,666.00	108%
63	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 2,712,521,843.48	Rp 2,602,718,572.00	96%
64	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 189,473,240.00	Rp 62,128,200.00	33%
65	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 118,442,188.00	Rp 62,384,680.00	53%
66	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 99,999,344.64	Rp 34,223,812.00	34%
67	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 2,058,260,000.00	Rp 2,070,895,660.00	101%
68	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 414,982,904.00	Rp 267,697,269.00	65%

69	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	Rp 2,317,271,817.00	Rp 2,017,027,068.00	87%
70	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 100,000,000.00	Rp 100,000,000.00	100%
71	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 996,028,500.00	Rp 428,036,401.00	43%
72	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 179,004,916.00	Rp 112,169,160.00	63%
73	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp 14,473,208.00	Rp 0.00	0%
74	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Rp 7,658,800.00	Rp 0.00	0%
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp 280,254,360.00	Rp 270,119,503.00	96%
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp 192,000,000.00	Rp 181,701,738.00	95%
77	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp 33,326,260.00	Rp 0.00	0%
78	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp 67,251,500.00	Rp 110,054,200.00	164%
79	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 166,249,212.00	Rp 161,536,189.00	97%
80	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 881,899,405.00	Rp 282,126,219.00	32%
81	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 10,322,069,290.00	Rp 9,025,469,386.00	87%
82	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 28,005,098,690.00	Rp 28,795,388,945.00	103%
83	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2,834,876,724.00	Rp 1,989,041,269.00	70%

84	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 893,287,731.00	Rp 594,863,653.00	67%
85	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 1,629,811,737.00	Rp 1,361,202,167.00	84%
86	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 19,051,926,659.60	Rp 2,817,260,874.00	15%
87	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 2,105,815,962.00	Rp 1,310,212,644.00	62%
88	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 5,599,978,446.12	Rp 5,248,040,790.00	94%
89	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 84,671,991.00	Rp 118,422,800.00	140%
90	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 284,015,226.00	Rp 494,261,375.00	174%
91	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp 1,141,657,684.00	Rp 1,179,280,000.00	103%
92	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp 575,559,822.00	Rp 376,381,875.00	65%
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 45,817,072.00	Rp 29,291,487.00	64%
94	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 8,062,100,556.00	Rp 7,742,306,357.00	96%
95	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 62,190,500.00	Rp 20,625,000.00	33%
96	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp 989,975,064.00	Rp 1,015,048,876.00	103%

97	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp 999,776,963.00	Rp 1,598,073,963.00	160%
98	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 106,607,365.00	Rp 195,561,365.00	183%
99	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 107,887,942.00	Rp 90,959,400.00	84%
100	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 129,807,680.00	Rp 103,302,770.00	80%
Total Anggaran		Rp 1,009,702,196,896.00	Rp 900,230,670,600.69	89%

Efisiensi penggunaan anggaran dihitung dengan rumusan:

$$1 - [(\% \text{realisasi anggaran} \times (1 / \% \text{capaian kinerja})) \times 100\%]$$

Dengan rata-rata % realisasi anggaran sebesar 89% (tabel 2.28) dan Rata-rata % capaian kinerja sebesar 95% (tabel 2.1) maka tingkat efisiensi anggaran pada Pemerintah Kota Binjai adalah:

$$= 1 - [89\% \times (1/95\%)] \times 100\%$$

$$= 0,0631$$

LAMPIRAN



2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP**

Jabatan : **WALI KOTA BINJAI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Binjai, 31 Januari 2025

WALI KOTA BINJAI,

Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA BINJAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB
		Opini BPK	Opini	WTP
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	75,00
		Nilai Evaluasi LPPD	Poin	3,38
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	86
		Persentase kondisi jalan baik	Persen	95,00
		Persentase akses air minum kota	Persen	100
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,00
4	Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)	Persen	11,90
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	30,50
		Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persen	41,80
5	Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	5,44

6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	76,72
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	83,77
8	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	79,73

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 644,847,017,115.22
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 79,293,106,358.00
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 4,996,256,098.00
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 83,702,734,655.00
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 951,636,804.00
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 517,233,000.00

7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp	703,702,846.00
8	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	5,431,757,000.00
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	8,492,813,000.00
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	3,531,225,006.00
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp	5,014,550,489.00
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp	19,638,564,890.00
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	9,860,976,765.00
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp	565,572,814.00
15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	524,185,545.60
16	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	273,600,000.00
18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	4,862,728,550.00
19	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp	20,000,000.00
20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp	7,526,400,000.00
21	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	4,246,720,512.00
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp	48,000,000.00
23	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp	110,003,646.26
24	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	151,061,762.00

25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp	409,738,604.00
26	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp	89,731,697.14
27	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp	136,611,672.00
28	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp	226,525,846.00
29	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp	53,883,672.00
30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp	2,531,965,262.00
31	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	62,399,258.00
32	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp	49,211,672.00
33	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp	127,282,600.00
34	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	120,522,010.00
35	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp	69,414,972.00
36	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	11,033,699.00
37	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp	391,060,520.00
38	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp	381,213,690.00
39	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp	9,394,944.00
40	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp	216,584,842.00
41	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp	183,779,500.00

42	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp	1,886,933,011.00
43	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp	70,922,702.97
44	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp	837,553,923.01
45	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp	48,701,395.18
46	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp	24,405,371.31
47	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp	104,681,630.40
48	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp	8,845,277.76
49	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	205,498,579.96
50	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp	129,999,732.96
51	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp	1,551,050,115.00
52	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp	106,599,565.50
53	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp	38,919,080.85
54	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp	7,971,339,134.54

55	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp	451,423,500.00
56	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp	27,520,000.00
57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp	12,270,000.00
58	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp	614,210,429.00
59	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp	2,620,257,147.00
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp	1,148,825,000.00
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	5,247,023,510.00
62	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp	2,352,985,870.50
63	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp	2,712,521,843.48
64	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp	189,473,240.00
65	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp	118,442,188.00
66	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp	99,999,344.64
67	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp	2,058,260,000.00
68	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp	414,982,904.00
69	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp	2,317,271,817.00

70	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp	100,000,000.00
71	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp	996,028,500.00
72	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp	179,004,916.00
73	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp	14,473,208.00
74	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Rp	7,658,800.00
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp	280,254,360.00
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp	192,000,000.00
77	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp	33,326,260.00
78	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp	67,251,500.00
79	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp	166,249,212.00
80	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp	881,899,405.00
81	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp	10,322,069,290.00
82	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp	28,005,098,690.00
83	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	2,834,876,724.00
84	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	893,287,731.00
85	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp	1,629,811,737.00
86	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp	19,051,926,659.60

87	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp	2,105,815,962.00
88	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	5,599,978,446.12
89	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	84,671,991.00
90	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp	284,015,226.00
91	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp	1,141,657,684.00
92	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp	575,559,822.00
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	45,817,072.00
94	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp	8,062,100,556.00
95	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	62,190,500.00
96	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp	989,975,064.00
97	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp	999,776,963.00
98	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp	106,607,365.00
99	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp	107,887,942.00

100	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 129,807,680.00
Total Anggaran		Rp 1,009,702,196,896.00

Binjai, 31 Januari 2025

WALI KOTA BINJAI,



[Handwritten Signature]

Drs. H. AMIR HAMZAH, M.AP



Pemerintah Kota Binjai Kembali Raih Opini WTP Ke-9 Kalinya



Inovasi KATA BAIK Bawa Pemko Binjai Raih Juara 1 pada North Sumatera Innovation Day 2025



Pemko Binjai Raih Penghargaan Pemerintah Daerah Pendukung Pengendalian Harga Komoditas Inflasi dari Bank Indonesia



Wali Kota Binjai Terima Apresiasi NPCI atas Komitmen Wujudkan Kota Ramah Disabilitas



#BinjaiMajuSejahtera
Berkelanjutan

DISKOMINFO
KOTA BINJAI



Drs. H. Amir Hamzah, M.AP
Wali Kota Binjai

Hasanul Jihadi, SH. S.Sos.M.Kn
Wakil Wali Kota Binjai

Selamat Atas Penghargaan Pemerintah Kota Binjai

Meraih Predikat Badan Publik Informatif
Pada Ajang Keterbukaan Informasi (KI) Awards
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.



binjainkota.go.id [dinaskominfokotabinjai](https://www.instagram.com/dinaskominfokotabinjai) [diskominfo kota binjai](https://www.facebook.com/diskominfo.kota.binjai)

Pemerintah Kota Binjai Berhasil Meraih Predikat Badan Publik Informatif pada ajang Keterbukaan Informasi (KI) Awards Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025



Binjai Raih Penghargaan UHC 2026 Kategori Pratama, Komitmen Jamin Kesehatan Warga Diapresiasi



Pemko Binjai Raih Empat Penghargaan di Bidang Hukum dari Kementerian Hukum Wilayah Sumut